PARTAI BULAN BINTANG (PBB) DI INDONESIA IDEOLOGI DAN PERJUANGAN POLITIK PASCA ORDE BARU 1998 - 2004

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana dalam Program Strata Satu (S-1)
Pada Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam (SPI)

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K A-2010 001 SPI
No. REG : A-2010/SPI/001
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

ZAINATUL ROHMAH
NIM. A02205023

Pembimbing :

Drs. H. Abdul Djalil, M.Pd
NIM. 194802121976031001

FAKULTAS ADAB
JURUSAN SEJARAH DAN PERADABAN ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEI
SURABAYA
2009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Zainatul Rohmah (A02205023)

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 15 Februari 2010

Pembimbing

Drs. H. Abdul Djalil, M.Pd.
NIP. 150 169 615

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji Tim Penguji dan dinyatakan lulus

pada tanggal 23 Pebruari 2010

Mengesahkan,
Fakultas Adab
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Kharisudin Aqib, M.Ag.
NIP. 196807171993031007

Ketua/ Pembimbing

Drs. H. Abdul Djalil, MP.d.
NIP. 194802121976031001

Penguji I,

Drs. Ahmad Nur Fuad, MA.
NIP. 196411111993031002

Penguji II,

Drs. M Ridwan, M.Ag
NIP. 195907171987031001

Sekretaris,

Dwi Susanto, MA
NIP. 197712212005011003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Zainatul Rohmah

NIM : A02205023

Jurusan : Sejarah Peradaban Islam (SPI)

Fakultas : Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika ternyata di kemudian hari skripsi ini terbukti bukan hasil karya sendiri, saya bersedia mendapatkan sanksi berupa **pembatan gelar kesarjanaan yang saya peroleh.**

Surabaya, 23 Februari 2010

Saya yang menyatakan

ZAINATUL ROHMAH
NIM. A02205023

ABSTRAK

Zainatul Rohmah, 2010 : PARTAI BULAN BINTANG (PBB) DI INDONESIA (IDIOLOGI DAN PERJUANGAN POLITIK PASCA ORDE BARU) 1998 – 2004
Jurusan Sejarah dan peradaban islam, fakultas ADAB IAIN Sunan Ampel Surabaya

Partai Bulan Bintang adalah sebuah partai islam yang lahir pasca Orde Baru, kelahiran Partai ini dilator belakangi oleh ketidak puasan para tokoh ulama khususnya Eks Masyumi dengan Praktek Politik Pinerintah Orde Baru terhadap Parpol Islam dan makin gencangnya gerakan kristenisasi atau tansiriyah pada saat itu.

Dalam skripsi ini penulis mencoba melakukan penelitian kepustakaan dan lapangan tentang "Partai Bulan Bintang (PBB) di Indonesia (Idiologi dan perjuangan Politik Pasca Orde Baru) 1998 – 2004
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang : 1) Bagaimana Idiologi Partai Bulan Bintang pada tahun 1998 – 2004, 2) Bagaimana perjuangan Partai Bulan Bintang di Indonesia dalam kancah politik pasca Orde Baru.

Yang menjadi Idiologi PBB yakni PBB adalah Partai Politik Islam yang harus berorasi islam. Akidah Islam. Oposisi dengan menggunakan konsep amar ma'ruf nahi mungkar dan harus berakhlak Islam.

Setelah Orba tumbang dan sebelum itu Masyumi telah menyatakan bubar maka satu-satunya Partai penerus perjuangan Masyumi yang di anggap Partai Islam paling Besar pada zamannya yakni PBB. Memperjuangkan syariat Islam dan menghendaki Perubahan amandemen UUD 1945 khususnya pasal 29 ayat (1) dari yang bersembunyi " Negara Berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa" menjadi berbunyi " Negara Berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduk pemeluknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRACT

Zainatul Rohmah, 2010: PARTAI BULAN BINTANG (PBB) IN INDONESIA (IDEOLOGY AND POLITICAL STRUGGLE AFTER THE NEW ORDER) 1998 to 2004
Department of History and Islamic civilization, Adab Faculty, IAIN Sunan Ampel Surabaya

Partai Bulan Bintang is an Islamic party that was born after the new Order, the birth of this party back on by a lack dilators satisfaction leaders, especially clergy Ex-Political Practices Masyumi with the New Order government of the Islamic Party and the more vigorous movements Christianity or *tansiriyah* at that time.

In this thesis the author tried to do the research literature and the field of "Partai Bulan Bintang (PBB) in Indonesia (ideology and political struggle Post New Order) 1998 to 2004"

This study aims to answer questions about: 1) How ideology Partai Bulan Bintang in the year 1998 to 2004, 2) How does the struggle Partai Bulan Bintang in the political arena of Indonesia in the post-New Order.

Un ideology which became the PBB is the Islamic Political Party of Islam should be oriented. Islamic theology. Opposition by using the concept of *"invite to good and forbidding from evil"* and must be a certain character of Islam.

After the New Order collapsed and before that had been declared disbanded Masyumi the sole successor of the Party in the struggle Masyumi considered most of the Islamic Party at the time is PBB. Islamic fighting and wants changes in particular the 1945 amendment of Article 29 paragraph (1) of the hidden "State Based on the Belief in God Almighty" to read "State Based on the divinity of the obligation to run of Islamic adherents for the people".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN TIM PENGUJI iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

ABSTRAK viii

DAFTAR ISI ix

PEDOMAN TRANSLITERASI xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 5

D. Kegunaan Penelitian 5

E. Pendekatan dan Perangkat Teori 6

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu 8

G. Metode Penelitian 10

H. Sistematika Pembahasan 11

BAB II : PARTAI BULAN BINTANG DAN REFORMASI

A. Latar belakang berakhirnya Orde Baru dan kronologi berakhirnya Orde Baru 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Munculnya Gerakan Reformasi 1998 18

C. Dinamika kehidupan partai Islam pada tahun 1998-2004 serta hubungan Partai Bulan Bintang dengan reformasi 20

D. Partai Bulan Bintang kaitannya dengan reformasi 26

BAB III : SEJARAH TERBENTUKNYA PARTAI BULAN BINTANG DAN PERKEMBANGAN PARTAI BULAN BINTANG MULAI TAHUN 1998-2004 28

A. Faktor-faktor yang melatar belakangi lahirnya PBB 28

B. Proses Berdirinya PBB 31

C. Perkembangan Partai Bulan Bintang 38

BAB IV : IDEOLOGI DAN PERJUANGAN PBB 45

A. Ideologi Partai Bulan Bintang 1988-2004 45

B. Perjuangan Partai Bulan Bintang Tahun 1998 – 2004 48

C. Memperjuangkan Syariat Islam 51

D. Program Perjuangan Partai Bulan Bintang Tahun 1998 – 2004 57

BAB V : PENUTUP 72

A. Kesimpulan 72

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS A-2010 001 SPI
No. REG : A-2010/SPI/001
ASAL BUKU :
TANGGAL :

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PARTAI BULAN BINTANG (PBB) DI INDONESIA (IDEOLOGI DAN PERJUANGAN POLITIK PASCA ORDE BARU) 1998-2004

A. Latar Belakang

Islam sebagai *dinullah* merupakan suatu system kehidupan, salah satu sistem yang diatur dalam Islam adalah politik. Semenjak kekuatan Islam mulai melemah beberapa gejala menunjukkan kurang bersatunya umat, walaupun banyak diantara organisasi Islam seperti kesatuan Islam, Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Nahdhlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah. Akan tetapi kurang menunjukkan kemampuan untuk mewakili umat Islam, fenomena tersebut dapat ditelusuri dalam lintas sejarah partai Islam di Indonesia. Atas dasar itulah akhirnya para pemimpin Islam sadar akan kelemahan dan kekuatan Islam akibat perpecahan, untuk itu telah dibentuk majelis Islam ala Indonesia atau disingkat dengan MIAI, terbentuknya MIAI merupakan bukti adanya kesadaran pemimpin-pemimpin Islam untuk menciptakan hubungan, Baik diantara partai-partai dan organisasi Islam.[1]

Setelah Indonesia merdeka, maka melalui kongres 7 November 1945 berhasil didirikan partai politik Masyumi oleh pemimpin-pemimpin Islam. Sebagai lanjutan dari Masyumi buatan Jepang. Masyumi bertekad untuk

[1] L. Hasan, Kuat Sukardiono, Dadi MH, *memilih Partai Islam*, (Jakarta: Gema Insana Press,1998),20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperjuangkan nasib politik umat Islam Indonesia. Masyumi pada masa-masa awal kemerdekaan sepenuhnya didukung oleh organisasi-organisasi besar Islam yang ada saat itu, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Masyumi juga mendapat dukungan dari partai Arab Indonesia yang didirikan oleh Abdurrahman Baswedan pada tahun 1934, yang kemudian bergabung dengan Masyumi pada akhir 1945. Namun romantisme hubungan antar organisasi Islam itu pada beberapa tahun setelahnya mengalami beberapa ujian yang ternyata tidak dapat dilalui oleh Masyumi. Hak ini disebabkan antara lain karena dalam adanya perbedaan pendapat masing-masing tokoh dari organisasi pendukung Masyumi, di sisi lain Masyumi juga semakin dikuasai oleh komunitas pembaharu yang diwakili oleh M. Natsir yang berasal dari Sumatra.

Bencana dimulai dengan keluarnya NU dari Masyumi sekitar 1950an, kekuatan politik Masyumi sedikit banyak berkurang, karena fakta menunjukkan bahwa setelah keluar dari Masyumi, NU memilih untuk menjadi partai politik sendiri. Dari sini dapat dilihat bahwa kekuatan politik Islam telah terpecah. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa keduannya masih harus diperhitungkan oleh partai-partai pesaing seperti PNI dan PKI.[2]

Ideologi Islam yang diperjuangkan oleh Masyumi akhirnya menemukan jalan buntu pada masa demokrasi terpimpin, tabrakan pemikiran antara Soekarno dan Natsir membawa dampak yang sangat fatal bagi perjalanan Masyumi di kancah perpolitikan Indonesia. Sebagaimana diketahui karena perbedaan pendapat diantara kedua tokoh tersebut, berdampak pada

[2] Anwar Harjono, *Perjalanan Politik Bangsa*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), XVI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembubaran Masyumi pada tahun 1960, meski bukan faktor ini saja yang menyebabkan Masyumi bubar, namun perbedaan pendapat itulah yang menjadi penyebab utama.

Setelah Masyumi bubar umat Islam seperti kehilangan pegangan selama orde lama dan orde baru, setelah rezim orde baru runtuh para ulama yang tergabung dalam wadah yang dinamai Forum Ukuwa Islamiyah (FUI),di antaranya yakni Dr anwar Harjono, SH, K.H latif Muchtar, MA, H.M.C.H Ibrahim, K.H sholeh Iskandar, K.H nur Ali, Drs nurul Huda, Rajab Ranggaolih, Prof Dr Ismail Sunny, SH, MCL, K.h. Dadun Abdulqahar, dan h Nurdin Lubis. Mencita-citakan adanya sebuah partai politik Islam yang bisa meneruskan perjuangan Masyumi. Untuk meningkatkan peran FUI dalam menyuarakan kepentingan rakyat, maka pada 12 Mei 1989 dibentuk badan yang berfungsi sebagai penyedia fasilitas bagi kelahiran partai yang diberi nama BKUI (Badan Koordinator Umat Islam). Tokoh-tokoh yang tergabung dalam FUI dan BKUI adalah para tokoh-tokoh Eks Aktivis Masyumi, setelah terjadi perundingan tentang pendirian partai maka pada hari 'umat 17 Juli 1998 dilakukan penandatanganan ikrar pendirian Partai Bulan Bintang yang selanjutnya disingkat PBB. Awalnya PBB akan dinamai Masyumi karena partai ini dianggap sebagai penerus perjuangan Masyumi tapi PBB menolak kalau dikatakan sebagai reinkarnasi Masyumi karena hubungan PBB dan Masyumi hanya sebatas menimba inspirasi. Karena itu alasan kenapa PBB tidak jadi di namai Masyumi, alasan yang lainnya karena, tokoh-tokoh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyumi di masa lalu di kenal mempunyai integritas pribadi yang tak terbantahkan. Maka dari itu bagi pemimpin partai yang baru, bisa menanggung beban moral yang berat bila tidak mampu menjaganya.[3]

PBB lahir sebagai partai politik Islam yang berakidah Islam, PBB menambah ajaran -ajaran Islam yang Universal untuk membangun sistem perpolitikan baru yang didasarkan pada nilai-nilai Islam yang Universal. Itu berarti Partai Bulan Bintang adalah wujud dari pemikiran modernisme politik Islam. PBB mempunyai prinsip ummatan wasatan, seperti yang dikatakan dalam Al-Qur'an bahwa umat islam itu adalah umat yang pertengahan, jadi PBB tidak mau disebut sebagai partai Islam yang ekstrem kanan maksudnya pada masa orde baru tokoh-tokoh Islam yang tergabung dalam BKUI dan FUI tidak puas dengan praktek menejemen politik orde baru yang berlaku tidak proporsional, Umat Islam yang mayoritas, Tokoh-tokohnya hanya mendapatkan akses yang relative sedikit. Akibatnya parah tokoh Ormas islam tidak bisa banyak mempengaruhi kekuasaan karena parah tokoh tersebut kerap kali dipersepsi hendak mendirikan "Negara Islam". Sebab Islam menyuruh dalam berpolitik agar membuka pintu yang seluas-luasnya untuk bekerja sama dengan golongan-golongan, serta komponen bangsa yang lain. PBB juga menyatakan sebagai partai yang demokrasi dalam sistem yang demokratis.[4]

---

[3] Zainal Abidin Amir, *Peta Islam Politik Pasca Soeharto*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003), 61.

[4] Cholid Novianto, *Era Baru Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 151-152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ideologi partai bulan bintang tahun 1998-2004?
2. Bagaimana perjuangan partai bulan bintang di Indonesia dalam kancah politik pasca orde baru?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang didirikannya Partai Bulan Bintang pada tahun 1998.
2. Untuk mengetahui ideologi Partai Bulan Bintang tahun 1998-2004
3. Untuk mengetahui perjuangan PBB dalam kancah politik Pasca Orde Baru.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun arti penting penelitian ini adalah

1. Guna melengkapi persyaratan untuk menyelesaikan program studi S-1 pada jurusan sejarah peradaban Islam .
2. Skripsi ini juga diharapkan sebagai tambahan referensi tentang studi sejarah, khususnya tentang sejarah perpolitikan umat Islam di Indonesia.
3. Untuk dapat membangkitkan kesadaran dan semangat baru dikalangan umat Islam dalam bidang intelektual dan kebudayaan.

E. Pendekatan dan Kerangka Teori

Menurut *Jorge Larrain*, Ideologi adalah suatu dari sekian banyak konsep yang paling equivocal (Meragukan) dan sukar ditangkap. Yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat dalam ilmu-ilmu sosial, bukan karena beragamnya pendekatan teoritis yang menunjuk arti dan fungsi yang berbeda-beda, akan tetapi karena Ideologi adalah konsep yang sarat dengan konotasi politik dan digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari.[5] Pendapat lain disampaikan William Liddle Ideologi memuat suatu konsepsi tentang tujuan yang perlu diraih dan tentang sarana-sarana untuk meraihnya.[6]

Pengertian perjuangan politik menurut Robson yakni perjuangan untuk memperoleh, dan mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, mempengaruhi pihak lain ataupun menentang pelaksanaan kekuasaan.[7]

Dari pengertian perjuangan politik menurut Robson serta pengertian ideologi menurut Jorge larrain dan William Lidlle, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud Ideologi dan Perjuangan Politik adalah suatu bentuk tujuan yang hendak dicapai dengan cara berjuang untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan serta melaksanakan kekuasaan, mempengaruhi dan menentang kekuasaan pihak lain.

Skripsi yang berjudul "Partai Bulan Bintang di Indonesia (Ideologi dan Perjuangan Politik pasca Orde Baru) 1998-2004", menggunakan pendekatan historis dan Sosiologi. Pendekatan Historis digunakan karena ingin mengungkap bagaimana dinamika pemikiran PBB Pasca Orde Baru 1998-2004. Sedangkan pendekatan Sosiologi digunakan karena PBB adalah Partai Islam yang berkembang ditengah-tengah Masyarakat yang mempunyai

---

[5] Jorge Larrain, *Konsep Idiologi* (Yogyakarta: LKPSM, 1990), 1-3.
[6] Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Grafindo, 1992), 32.
[7] Guillermo O'Donnell, *Transisi Memuju Demokrasi Tinjauan Berbagai Prespektif* (Jakarta: P3ES, 1993), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ideologi berdasarkan Islam, dan mempunyai kecenderungan dalam gerakan lebih Modernis dan Kompromis dengan Idealisme *Izzul Islam Wal Muslimin* (Kejayaan Islam dan Kaum Muslimin). Meskipun Partai ini berasaskan Islam tetapi tidak menghendaki Negara yang bersistem Khilafah atau yang lainnya kecuali Pancasila. Ini merupakan hal baru maka ada kelompok Masyarakat dalam menanggapi Isu-isu yang menjadi cita-cita atau Ideologi PBB. Berarti studi ini perlu melacak kondisi sosial yang terjadi dalam Masyarakat Indonesia,dengan menggunakan teori *Transformasi Sosial* yang di cetuskan oleh *Blumer* sebagai perubahan pola fikir masyarakat. Karena kebanyakan Masyarakat Indonesia menganggap setiap Partai Islam yang ada di Indonesia pasti bercita-cita ingin mendirikan Negara yang bersisitem Khilafah. Padahal belum tentu semua Partai Islam yang ada pada saat ini bercita-bercita ingin mendirikan Negarah yang bersisitem Khilafah, maka dari itu skripsi ini perlu menggunakan Teori *tranfonsformasi social* Blumer untuk merubah pola fikir Masyarakat Indonesia. Partai Bulan Bintang adalah wujud dari pemikiran modernisme Politik Islam yang mempunyai prinsip *Ummatan Wasatan*. PBB lahir karena dukungan parah Tokoh Eks Aktivis Masyumi yang ingin mendirikan Partai Islam, untuk meneruskan Ideologi dan Perjuangan Masyumi yang di bubarkan pada tahun 1960. Sehingga PBB memanfaatkan keunggulan Sejarah Masyumi yang menjadi satu-satunya Partai Islam pada tahun 1945-1960 untuk menarik masa. Pasca renzim Orde Baru runtuh,Dari uraian diatas maka kerangka teori ke dua yang digunakan untuk pembahasan Skripsi ini adalah Teori Optimalisasi Terbatas, karena Langkah yang diambil PBB untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menarik masa dengan memanfaatkan keunggulan sejarah masa lampau ini dikatakan oleh *Majone* sebagai teori Optimalisasi Terbatas, yaitu memanfaatkan secara optimal keberhasilan sejarah masa lampau untuk memperoleh tujuan masa kini.[8]

Teori optimalisasi terbatas *Majone* dapat digunakan untuk menganalisa bagaimana PBB berusaha untuk mencapai tujuannya, yaitu: tetap menjadi pilihan umat Islam untuk menyalurkan aspirasi politiknya dengan memanfaatkan keunggulan sejarah masa lalu. Teori ini akan dipakai untuk menganalisa bab empat dalam penulisan skripsi ini.

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

PBB adalah partai politik Islam yang mempunyai kecenderungan dalam gerakan lebih Modernis dan Kompromis dengan Idealisme *Izzul Islam wal muslimin* (kejayaan Islam dan kaum muslimin). Dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan zaman yang selalu berubah substansinya.

Adapun penelitian terdahulu mengenai PBB yang pernah dilakukan adalah:

Skripsi: Muhammad Abdillah, Mahasiswa Fakultas Adab, Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam, tahun 2003, dengan judul "Masyumi dan Partai Bulan Bintang (*Studi komparatif Asas dan* Tujuan *Partai Dilihat dari Anggaran Dasar* Partai)".

---

[8] Aminuddin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Soeharto* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Abdillah ini. Mengatakan bahwa setelah Indonesia merdeka, maka melalui kongres 7 November 1945 berhasil didirikan partai politik Islam Masyumi, kemudian setelah Masyumi bubar lahirlah Partai Bulan Bintang yang di anggap sebagai generasi penerus dari Masyumi. Yang mencita-citakan terwujudnya syari'at Islam dalam diri pribadi, keluarga, masyarakat dan Negara. Maksudnya adalah Islam menjadi dasar persyari'atan yang mengatur setiap dimensi kehidupan, dan dalam cita-citanya ingin menegakan ajaran Islam dalam masyarakat. Bukan untuk mendirikan negara Islam.

Skripsi: Sudiarto, Mahasiswa fakultas syari'ah, jurusan Siyasah Jinayah, tahun 2004, *dengan judul "Sisi Fundamentalisme Partai Politik Islam di Indonesia (telah kritis atas partai bulan bintang)"*.

Skripsi yang ditulis oleh Sudiarto ini. Mengatakan keinginan untuk memunculkan piagam Jakarta dalam amandemen UUD 1945 yang berbunyi "*Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya*". Pada sidang tahunan MPR RI oleh Partai Bulan Bintang merupakan cermin dari fenomena politik Fundamentalisme Islam. Perjuangan politik dengan mencantumkan piagam Jakarta dalam UUD 1945 dipahami sebagai adanya pendekatan pendekatan hubungan antara Agama dan Negara

G. Metode Penelitian

Heuristik, yaitu kegiatan menghimpun jejak masa lalu, maksudnya kegiatan mengumpulkan data-data yang ada hubungannya dengan Partai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bulan Bintang .Berkenaan dengan sumber dalam skripsi ini penulis menemukan sumber kepustakaan, dan sumber lisan yang didapat dari wawancara dengan tokoh-tokoh PBB yang ada di Surabaya, seperti wawancara dengan bapak Fuad Amsyari. Sedangkan sumber kepustakaan yang digunakan sebagai penunjang adalah buku-buku tentang sejarah politik Indonesia.[9]

Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 1987.

Zainal Abidin Amir, *Peta Politik Pasca Soeharto*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003.

Khalid Novianto, *Era baru Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1999.

Setelah terkumpul sumber data primer dan sekunder yang dibutuhkan terkumpul langkah selanjutnya ialah **kritik**, tahapan ini dimulai dari mengkritisi data hasil wawancara dan data kepustakaan yang sudah ada, mengedit data, melihat kembali kelengkapan data dan diselingi dengan beberapa penambaha. dan pengurangan data apabila diperlukan, kemudian mengklasifikasi (mengategorikan) data sehingga tercapai pemilihan data yang rapi dan terdeskripsi permasalahan yang ada dan jelas.[10]

Tahap selanjutnya yaitu **interpretasi** seringkali disebut juga analisis sejarah, analisis sendiri berarti menguraikan dalam hal ini data yang terkumpul dibandingkan lalu disimpulkan agar bisa dibuat penafsiran terhadap data

---

[9] Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghali Indonesia, 1998), 63.
[10] Hamzah Ahmad, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Fajar Mulya, 1996), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga dapat diketahui penyebab dan kesesuaian dengan masalah yang diteliti yaitu tentang ideologi dan perjuangan PBB 1998-2004.

Historiografi. Sebagai tahap terakhir dalam metode sejarah penelitian sejarah yakni cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian. Layaknya laporan penelitian ilmiah, penulis mencoba menuangkan penelitian sejarah, ke dalam suatu karya berupa skripsi. Penulisan ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian dari awal hingga akhir.[11]

H. Sistematika Bahasan

Sistematika pembahasan atau gambaran secara garis besar dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan dari skripsi ini. Dalam pendahuluan ini dipaparkan hal-hal mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, pendekatan dan kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika bahasan.

Bab II adalah pembahasan mengenai terbentuknya PBB. Secara lebih detail dalam bab dua ini akan dibahas mengenai proses berdirinya PBB, dan perkembangan PBB mulai munculnya sampai tahun 2004.

Kemudian pembahasan dilanjutkan dengan Bab III tentang PBB dan Reformasi. Bab ini memuat pembahasan mengenai munculnya gerakan reformasi tahun 1998, gambaran kehidupan partai politik Islam pada tahun 1998 – 2004, dan PBB kaitannya dengan reformasi.

---

[11] Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya Bab IV adalah pembahasan mengenai ideologi dan perjuangan PBB, yang secara detail akan dipaparkan mengenai ideologi PBB dan perjuangan politik pasca Orba 1998 – 2004, azas dan tujuan PBB dilihat dari ideologi PBB dan aktivitas PBB tahun 1998 – 2004.

Terakhir adalah Bab V yaitu penutup dari semua pembahasan yang ada dalam skripsi ini, yang memuat mengenai kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PARTAI BULAN BINTANG DAN REFORMASI

A. Latar Belakang Berakhirnya Orde Baru

Krisis Ekonomi Politik merupakan awal dari berakhirnya Orde Baru yang selanjutnya disebut Orba. Pemerintah dianggap gagal dalam membina kehidupan politik yang demokratis, terbuka, adil dan jujur. Pemerintah bersikap otoriter, tertutup, dan personal masyarakat yang memberikan kritik sangat mudah di tuduh sebagai anti Pemerintah, menghina Kepala Negara, Anti Pancasila, dan subversife (Menggulingkan Pemerintah). Akibatnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis tidak pernah terwujud, dan Golkar yang menjadi partai terbesar pada masa itu diperoleh pemerintah Orba untuk mengamankan kehendak penguasa.

Prakti KKN meluas ditubuh Pemerintah dan tidak mampu di cegah karena banyak pejabat Orba yang berada di dalamnya. Anggota MPR / DPR tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan benar karena keanggotaannya ditentukan dan mendapat restu dari penguasa, sehingga banyak anggota yang bersikap tidak kritis. Serta meluasnya KKN menimbulkan ketidak percayaan masyarakat. [12] Selain itu kesalahan terbesar Pemerintah Orba ketidak mampuannya membangun sumber daya manusia yang tangguh, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Di bawah Pemerintahan Orba

[12] "Sri Bintang Pamungkas, *ke Indonesia Baru lewat Reformasi Total* (Jakarta, Erlangga, 2001) XII-XIII.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selama 30 Tahun Indonesia tidak bisa dicatat sebagai Negara yang mampu melaksanakan terobasan teknologi dengan kemampuannya sendiri. Masayarakat Indonesia tergantung dan menjalankan mesin-mesin asing untuk menciptakan prodik-produk Indonesia, kalau saja mesin-mesin asing tersebut dijalankan dengan kemampuan produksi Indonesia yang lebih tinggi di banding dengan kemampuan orang-orang asing yang menciptakan mesin-mesin itu. Maka Rakyat Indonesia bisa menjadi lebih baik dan lebih maju seperti yang diharapkan selama ini. Tetapi bila masyarakat Indonesia tetap tetap menjadi masyarakat yang lemah dalam berproduksi dan tetap tidak mampu menciptakan mesin ataupun melakukan terobosan teknologi yang lebih baik. Maka peningkatan dan kemajuan sulit di capai, bahkan keadaan seperti krisis ekonomi dan krisis politik yang memicu munculnya krisis di bidang sosial persoalan tersebut juga menjadi penyebab berakhirnya Orba dan memunculkan Gerakan Reformasi.

Pada penghujung tahun 1997 di indonesia telah terjadi goncangan ekonomi yang hebat, yang diakibatkan nilai tukar rupiah yang merosot tajam atas dolar Amerika. Kurs Rupiah yang merosot terhadap dolar sempat terdepresiasi sampai dua ratus lima puluh persen dari nilai tukar sebelum tahun 1997.[13] yang membuat perekonomian indonesia menjadi surut tajam, krisis moneter ini membawa dampak sangat serius terhadap perekonomian Nasional seperti laju informasi begitu tinggi hingga mencapai duaratus persen, yang diikuti naiknya harga barang-barang dan banyak perusahaan yang gulung tikar.

---

[13] Aminudin, *kekuatan Islam dan pergulatan Kekuasaan di Indonesia Sesudah dan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam mengahadapi tantangan ekonomi yang berat tersebut Pemerintah Soeharto melakukan sebagai upaya pemulihan, mulai dari penyehatan perbankan, negosiasi bantuan keuangan dengan IMF dan sebagainya. Tetapi, berbagai tindakan yang diambil pemerintahan untuk memulihkan kembali stabilitas ekonomi dan moneter itu hanya sia-sia, tidak ada kemajuan yang berarti, kondisi ini semakin diperburuk oleh anjloknya harga minyak dipasaran Internasional pada minggu ketiga bulan maret 1998 yang jelas semakin menyusutkan sumber Pendapatan Negara. Keadaan ini telah menimbulkan dampak merosotnya perekonomian Rakyat secara umum terutama kalangan masyarakat Proletar.[14]

Kronologi Berakhirnya Orde Baru

5 Maret 1988 ; Dua puluh maha siswa Universitas Indonesia mendatangi Gedung DPR/MPR untuk menyatakan penolakan terhadap pidato pertanggung jawaban presiden yang disampaikan pada sidang Umum MPR dan menyerahkan Agenda Reformasi Nasional. Mereka diterima Fraksi ABRI

11 Maret 1998 : Soeharto dan BJ Habibie disumpah menjadi Presiden dan Wakil Presiden

14 Maret 1998 : Soeharto mengumumkan kabinet yang dinamai Kabinet Pembangunan VII

15 April 1998 : Soeharto meminta mahasiswa mengakhiri protes dan kembali ke kampus karena sepanjang bulan ini mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi swasta dan negeri melakukan unjuk rasa menuntut dilakukannya Reformnasi Politik.

---

[14] Ibid. 356.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

18 April 1998 : Menteri Pertahanan dan Keamanan / Panglima ABRI Jendral. Purn. Wiranto dan 14 Menteri Kabinet Pembangunan VII mengadakan dialog dengan mahasiswa di Pekan Raya Jakarta, namun cukup banyak perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang menolak dialog tersebut.

1 Mei 1998 : Soeharto melalui Menteri Dalam Negeri Hartono dan Menteri Penerangan Alwi Dachlan mengatakan bahwa Reformasi baru bisa dimulai tahun 2003

2 Mei 1998 : Pernyataan tersebut di ralat dan kemudian dinyatakan bahwa Soeharto mengatakan Reformasi bisa sejak dilakukan sekarang (tahun 1998)

4 Mei 1998 : Mahasiswa di Medan, Bandung dan Yogyakarta menyambut kenaikan harga bahan bakar minyak (2 Mei 1998) dengan demonstrasi besar-besaran. Demonstrasi itu berubah menjadi kerusuhan saat para demonstran terlibat bentrok dengan petugas keamanan. Di Universitas Pasundan Bandung, 16 Mahasiswa luka akibat bentrokan tersebut.

9 Mei 1998 : Soeharto berangkat ke Kaero, Mesir untuk mengahadiri KTT G-15 ini merupakan kunjungan terakhirnya keluar Negeri sebagai Presiden RI.

5 Mei 1998 : Demonstrasi Mahasiswa besar-besaran terjadi di Medan yang berujung pada kerusuhan

12 Mei 1998 : Aparat keamanan menembak empat Mahasiswa Trisakti yang berdemonstrasi secara damai keempat Mahasiswa tersebut ditembak saat berada dihalaman kampus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

13 Mei 1998 : Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta, Bogor, Tanggerang, dan Bekasi datang ke kampus Trisakti untuk menyatakan duka cita kegiatan itu diwarnai kerusuhan.

14 Mei 1998 : Soeharto mengatakan bersedia mengundurkan diri jika Rakyat menginginkan, ia mengatakan itu didepan masyarakat Indonesia dalam kunjungan terakhirnya di Kairo. Sementara itu kerusuhan dan penjarahan terjadi di beberapa pusat perbelanjaan di Jabotabek. Beberapa dari bangunan pusat perbelanjaan itu dirusak dan dibakar, sekitar 500 orang meninggal dunia akibat kebakaran yang terjadi selama kerusuhan.

15 Mei 1998 : Soeharto tiba di Indonesia setelah mempersingkat kunjungannya di Kairo, ia membantah telah mengatakan bersedia mengundurkan diri. Suasana Jakarta masih mencekam. Toko-toko banyak ditutup, sebagian warga masih takut keluar rumah.

16 Mei 1998 : Karena takut menjadi korban amuk masa warga asing berbondong-bondong kembali ke Negara mereka. Suasana di Jabotabek masih mencekam. 19 Mei 1998 : Soeharto memanggil sembilan tokoh Islam seperti Nurcholis Madjid, Abdurrahman Wahid, Malik Fajar, dan KH. Ali Yafie. Dalam pertemuan yang berlangsung 2,5 jam itu, para tokoh menjelaskan situasi terakhir negeri ini. Dimana elemen masyarakat dan mahasiswa tetap menginginkan Soeharto mundur. Permintaan tersebut di tolak Soeharto. Ia mengajukan Pembentukan Komite Reformasi, (Dewan atau Komisi Reformasi). Untuk meredam masa Soeharto menyatakan pernyataan bahwa ia tidak mau dipilih lagi menjadi Presiden. Namun hal itu tidak mampu meredam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aksi massa. Mahasiswa yang datang ke Gedung MPR untuk berunjuk massa semakin banyak. Sementara itu Wakil Presiden Amin Rais mengajak Massa mendatangi Lapangan Monumen Nasional untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional

20 Mei 1998 : Namun jalur jalan menuju Lapangan Monumen Nasional diblokade (ditutup) petugas aparat dengan pagar kawat berduri untuk mencegah massa masuk ke Komplek Monumen Nasional. Namun pengerahan massa tidak jadi dilakukan. Amin Rais meminta massa agar datang ke Lapangan Monumen Nasional karena ia khawatir kegiatan untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional akan menelan korban jiwa, dan bentrok antara massa dan Aparat Keamanan. Sementara ribuan Mahasiswa tetap bertahan dan semakin banyak berdatangan ke Gedung MPR / DPR. Mereka mendesak agar Soeharto mundur.

21 Mei 1998 : Bertepat di Istana Merdeka, Kamis, pukul 09.05 Soeharto mengumumkan [15] mundur dari kursi Presiden dan BJ Habibie disumpah menjadi Presiden RI Ke 3

B. Munculnya Gerakan Reformasi 1998

Dengan mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan menandai akhir dari masa Kekuasaan Orde Baru dan memasuki era baru yang disebut Reformasi pada Era Reformasi ini banyak tuntutan yang menyuarakan untuk melakukan Reformasi di segala bidang khususnya Bidang Politik, Ekonomi, dan Sosial. Munculnya Reformasi dibidang Politik disebabkan oleh adanya

[15] http://www.fredom-institut.org/id/index.phn?pag 2 : lokakarya dan id : 517.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KKN. Ketidak adilan dalam bidang Hukum. Pemerintahan orde baru yang otoriter (tidak demokratis) dan tertutup. Terjadinya Reformasi Politik ini ditandai dengan penghentian berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1985 yang diganti dengan Undang-Undang RI No 2 Tahun 1999 dan disempurnakan dengan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2002, yang memberi kebebasan, untuk mendirikan Partai Politik dan Kebebasan memilih asas.

Dengan adanya kebebasan mendirikan Partai Politik ini berakibat pada banyak lahirnya Partai-Partai Politik Islam. Diantaranya juga terdapat Partai-Partai Politik Islam, yang banyak bermunculan dalam jumlah besar. Dari 48 Partai peserta Pemilu 1999 terdapat 19 Partai yang dapat dikategorikan sebagai Partai Politik Islam, diantaranya Partai Bulan Bintang.

Bidang ekonomi, munculnya Reformasi di bidang ekonomi disebabkan oleh adanya sistem monopoli di bidang perdagangan, jasa, dan usaha. Pada masa orba orang-orang yang dekat dengan Pemerintah akan mudah mendapatkan fasilitas dan kesempatan, bahkan mampu berbuat apa saja demi keberhasilan usahanya. Selain itu juga disebabkan oleh krisis moneter, krisis tersebut membawa dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat Indonesia dan bidang usaha. Banyak perusahaan ditutup sehingga terjadi PHK dimana-mana yang menyebabkan angka pengangguran meningkat tajam serta munculnya kemiskinan dimana-mana dan krisis perbankan. Hal-hal tersebut perlu dilakukannya tindakan-tindakan yang cepat dan tepat untuk mengatasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bidang Sosial, krisis ekonomi dan politik pada masa Pemerintahan orde baru berdampak pada kehidupan sosial di Indonesia, seperti munculnya peristiwa pembunuhan dukun santet di Situbondo, perang saudara di Ambon, peristiwa Sampit, peredaran Narkoba semakin luas, meningkatnya kejahatan, pembunuhan, dll.[16]

C. Dinamika Kehidupan Partai Islam Pada Tahun 1999 – 2004 Serta Hubungan partai Bulan Bintang dengan Reformasi.

Partai Politik merupakan bagian yang melekat dalam proses demokrasi di Indonesia, keberadaan Partai Politik yang disingkat dengan Parpol, termasuk diantaranya Partai Politik Islam, sebagai bagian dari ekspresi politik masyarakat perlu terus di pelihara dan dikembangkan sekaligus juga disesuaikan dengan kondisi, situasi dan kebutuhan masyarakat. Namun perlu diperhatikan bahwa Partai Politik bukan sekedar organisasi politik yang mempunyai hubungan terbatas dengan para pendukung dan simpatisannya di masyarakat. Masa hidup Parpol tidak tergantung pada masa jabatan atau masa hidup para pemimpinnya. Setiap Parpol yang sudah terbentuk harus mampu eksis dengan cara berakar kuat dalam masyarakat lokal, melakukan kegiatan terus-menerus, berusaha memperoleh kekuasaan dalam pemerintahan dan ikut serta dalam Pemilihan Umum. Bila melihat ciri-ciri tersebut, organisasi Politik yang tidak berakar di tengah-tengah masyarakat, tidak memiliki cabang di daerah-daerah, tidak mempunyai kegiatan secara berkesinambungan, berarti tidak dapat dikategorikan sebagai Parpol.

---

[16] Sudirman Tebba, *Islam pasca orde baru* (Yoyakarta ; PT. Tiara Wacana, 2001,XII.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejarah kemunculan Partai Politik Islam di Indonesia bisa mengikuti Tiga Teori diantaranya. Teori kelembagaan artinya Partai Politik di bentuk oleh kalangan legislatif (dan eksekutif) karena adanya kebutuhan yang mendesak dari para anggota parlemen yang ditentukan berdasarkan pengangkatan untuk mengadakan kontak dengan masyarakat dan membina dukungan dari mereka, yang kedua Teori situasi historis yaitu Parpol muncul sebagai upaya sistem Politik mengatasi krisis yang ditimbulkan karena perubahan masyarakat secara luas, krisis historis terjadi karena sistem Politik mengalami masa transisi karena perubahan masyarakat dari bentuk tradisional yang berstruktur sederhana menjadi masyarakat modern yang berstruktur kompleks. Kemudian ke tiga Teori Pembangunan yang melihat Parpol sebagai produk modernisasi sosial ekonomi.[17]

Parpol Islam yang lahir dan mengikuti Pemilu 1955 sesuai dengan teori situasi historis pada saat perubahan situasi masyarakat dari zaman Penjajahan yang identik dengan pengekangan dan penindasan menuju zaman yang penuh kebebesan. Parpol Islam yang banyak bermunculan pada saat itu mengalami krisis identitas dan legitimasi, jadi setiap partisipasi Rakyat diantisipasi sedini mungkin dengan pembentukan Parpol berakar kuat di Masyarakat bahkan masih tetap diingat kebesarannya sampai sekarang seperti Masyumi dan PSII.

Teori kelembagaan sesuai dengan kondisi Partai Politik Islam dalam Pemilu 1977 pada saat itu proses fusi atau penyederhanaan Partai terjadi dengan daasar hukum UU No. 3 Tahun 1975. Tiga parpol Islam yang dipaksa

---

[17] A Zyumardi Azra, *Pergolokan Politik Islam*, (Jakarta ; Paramadina, 1996),20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bergabung oleh Pemerintah menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), karena PPP dianggap menjadi kekuatan penyeimbang Partai bentuk Pemerintah yaitu Golkar. Kondisi ini terjadi sampai masa Reformasi.

Di masa Reformasi Partai Politik Islam tumbuh kembali, kelahiran sebagai Partai-Partai Islam tampak memiliki akar idiologi yang kuat pada sejarah kepartaian yang pernah mewarnai Politik nasional ketika pertama kali Pemilu diselenggarakan tahun 1955. Di masa Reformasi euforia Politik ditandai dengan banyak berdirinya Partai Islam, dan di Pemilu 1999 dari 48 Partai Politik 20 diantaranya adalah Partai Islam, dan di Pemilu 2004 dari 24 Partai Politik ada 7 Partai Politik Islam. Jumlah tersebut mengikuti kepada 5 kriteria Partai Politik Islam yaitu berdasarkan simbol atau nama partai, asas partai, basis atau konstitusi partai, program atau platform partai, dan tujuan partai.[18]

Dalam Pemilu 1999 kemunculan Partai Politik mengikuti situasi historik, yaitu yaitu perubahan politik dari rezim Orde Baru menjadi Rezim Orde Reformsi. Kemunculan Partai Politik Islam berkaitan dengan upaya mengantisipasi perubahan tersebut. Sedangkan dalam Pemilu 2004 Partai Politik Islam merupakan produk modernisasi sosial politik, maksudnya keberadaan Partai Islam harus mengikuti aturan Politik yang berkembang pada saat itu.

Di Indonesia ada tiga fenomena yang sangat mencolok dalam pola persaingan dan kerjasama Partai. Pertama Politik Kepartaian di Indonesia

---

[18] Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara "Transformasi pemikiran dan Praktis politik Islam di Indonesia,* (Jakarta ; Paramadina), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperlihatkan munculnya persaingan sekaligus kerjasama Partai, menjelang digelarnya Pemilu 1999 nampak bahwa Politik elektoral memperlihatkan suatu persaingan nyata diantara Parta-partai Politik. Semua Parpol memiliki kebebasan untuk menegaskan warna idiologis mereka, dan para pemilih tidak lagi diintimidasi dalam memilih Partai pilihan mereka. Penegasan idiologis menjadi Norma dari Politik elektoral dalam usahanya untuk mendapatkan suara. Masing-masing Partai mengidentifikasi dirinya sebagai partai islam atau partai Sekuler. Meskipun demikian, ketika menyangkut proses pembentukan Pemerintahan, persaingan politik yang ada seperti berhenti. Perbedaan-perbedaan idiologis diantara berbagai partai tampak sebagai non faktor dalam proses pembentukan pemerintahan. Dengan nama Persatuan nasional, kabinet yang kemudian terbentuk tersusun dari semua partai di DPR yang mencakup Partai Islam dan Sekuler.

Fenomena yang ke dua pada Pemilu 2004 memperlihatkan suatu pola yang serupa, partai-partai Politik dengan berbagai pandangan Politik bersaing keras dalam Pemilu Legislatif dan Presiden. Ketika pemilu tersebut berakhir. Partai-partai yang ada seperti membuang watak bersaing mereka dan umumnya mengabaikan hasil-hasil pemilu, untuk membentuk sebuah Pemerintahan yang mencakup semua pihak. Dengan mengambil nama yang serupa, kabinet Persatuan Indonesia, Partai-partai Islam Sekuler bergabung kedalam kabinet-kabinet tersebut, sekali lagi, idiologi partai tampak sebagai non faktor dalam pembentukan kabinet tersebut, dan akibatnya tidak ada partai-partai oposisi di panggung Politik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam fenomena yang ke tiga, semakin memperbesar keanehan sistem kepartaian Indonesia, memasuki Pemilu 2004, dua Partai Islam PPP dan PBB menjadi lebih konservatif. Dan memperlihatkan tingkat Islamisme yang lebih tinggi, serta mendorong dimasukkannya syariah atau hukum islam dalam konstitusi, mereka membedakan diri dari Partai-partai yang lain. Akibatnya jarak idiologis antara partai-partai islam dan Sekuler semakin meluas. Terlepas dari kenyataan ini, Partai-partai Sekuler merangkul Partai Islam dalam koalisi untukPemilu Presiden, mengokomodasi Partai Islam dalam kabinet dan mengajak Partai islam dalam sebuah kaukus parlementer seolah-olah tidak ada perbedaan idiologis antara partai-partai Islam dan Sekuler tersebut.[19]

Namun sejak Pemilu 1955 sampai Pemilu 2004 Program Penegakan Syariah islam termasuk Negara berasas Islam selalu menjadi andalan kampanye Partai Politik Islam. Bahkan dalam kampanye Pemilu isu tentang islam sangat banyak mengemuka, dan kepentingan masyarakat yang diangkat oleh Partai Politik Isalam juga berasarkan isu-isu keislaman, seperti dalam amandemen UUD 1945 isu tentang memasukkan Piagam Jakarta yang memuat tujuh kata" dan menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya." Diusung oleh Partai Politik Berasas Islam yaitu PBB, PPP, dan PKS. Namun ternyata isu tersebut gagal diangkat menjadi keputusan diparlemen. Ada kecenderungan Isu-isu yang terlalu spesifik juga menjadikan Partai Islam kurang diminati seperti yang terjadi di Pemilu 1999

[19] Asep Saefl Muhtadi, *Komunikasi Politik Indonesia "Dinamika Islam Politik Pasca Orde Baru"*. (Bandung : Rosdakarya, 2008), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada Pemilu 2004, isu kerakyatan serta program kerja secara umum lebih banyak yang mengemuka, berbeda dengan Pemilu sebelumnyatahun 1999 kerap menjadikan agama sebagai komoditas utama. Mulai dari iming-iming utuk mendirikan Negara Islam, penegakan syariat islam, larang presiden Perempuan. Sampai fatwa Politik untuk mendukung Partai-partai Islam. Sikap realistis partai Islam inilah yang menjual isu-isu agama secara tidak bertanggung jawab, konstituan bukan semakin tertarik dengan Partai Islam, justru semakin enggan mendukung Partai Islam. Hal ini karena citra buruk Partai Islam yang tidak lagi konsisten dengan garis Perjuangan mereka. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dapat dijadikan contoh Partai ini jelas-jelas telah menodai iklar Politiknya ketika menerima tampuk kepemimpinan Wakil Presiden dibawah Presiden Perempuan, padahal pada kampanye 1999 mereka mengharamkan kepemimpinan perempuan. Hal inilah yang dijadikan pengalaman parpol Islam pada Pemilu 2004. agar tidak mengankat isu yang terlalu spesifik atau kurang diminati.

Dari gejalah kurang sehat itulah. Partai Islam mulai realistis untuk tidak lagi mengeluarkan jargon agama untuk menarik simpati. Selain partai-partai islam kesulitan mewujutkan janji, mereka juga sadar bahwa Agama tidak semestinya digiring ke wilayah Politik yang Abu-abu.

Dari uraian diatas kita melihat bahwa Partai Politik Islam menghadapi tantangan yang sangat besar dalam mempertahankan eksistensinya. Perubahan kondisi masyarakat tentu saja perlu terus dijadikan pertimbangan agar Parpol Islam bisa terus eksis dalam belantika perpolitikan nasional. Sebagai bagian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari proses demokratisasi Politik Nasional. Parpol Islam perlu merenkontruksi diri untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Bukan lagi waktunya untuk mendirikan Partai-partai Politik Islam yang baru. Tetapi bagaimana bisa mengoptimalkan partai yang sudah ada. Selain itu juga pembentukan citra dan program yang di angkat harus berorientasi kepada apa yang dibutuhkan masyarakat Indonesia saat ini, seperti keberpihakan partai kepada kebutuhan masyarakat misalkan kesejahteraan ekonomi, ketersediaan lapangan kerja, pendidikan gratis dan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya pragmatik.[20]

D. Partai Bulan Bintang Kaitannya Dengan Reformasi

Partai Bulan Bintang yang berdiri pada 17 Juli 1998, merupakan salah satu partai islam yang lahir pasca orde baru turun. PBB sebagai hasil dari Reformasi dan orang yang masuk dalam PBB adalah orang-orang yang ikut memperjuangkan Reformasi. Diantaranya yakni Ketua Umum pertama Partai Bulan Bintang Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra SH. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh PBB yang ikut andil dalam memperjuangkan Reformasi tetapi tidak tercatat, salah satu gagasan Yusril yang diterima dan di respon baik oleh masyarakat Indonesia dan Presiden Habibie pada waktu masih menjabat sebagai Presiden pengganti Soeharto yakni tentang Reformasi Konstitusi, atau Reformasi Tata Hukum. Reformasi ini dimaksudkan untuk menciptakan tata hukum yang kuat.[21]

---

[20] Bahtiar Effendy, *Teologi baru Politik Islam "Pertautan Agama dan Negara"*, (Jakarta ; Gramedia Pustaka Utama, 1993), 105 – 107.

[21] Sudarno hadi,PBB sebagai hasil dari reformasi dan orang-orang yang masuk dalam PBB adalah orang-orang yang ikut memperjuangkan reformasi diantaranya yakni ketua umum pertama PBB Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra. Kantor PBB Surabaya, 15 Juli 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena kehidupan demokrasi tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sistem hukum yang menjamin kepastian hukum. Tanpa adanya hal ini, maka sistem politik yang tercipta hanya akan menguntungkan satu pihak saja, terutama pihak yang kebetulan memiliki kekuasaan.[22] Reformasi sistem hukum tata negara yang dimaksud diantaranya adalah Perubahan secara mendasar sistem hukum yang mengatur kehidupan politik, wujud dari gagasan Yusril yang di setujui dan didukung oleh semua Tokoh – Tokoh PBB adalah kebebesan mendirikan Partai, bahkan sampai sekarang hal itu masih berlaku di Indonesia. Bermula dari Alasan-alasan Konstitusional inilah bahwa pentingnya membangun kehidupan Politik yang Hakiki dan Demokratis berdasarkan Prinsip Konstitusi yang paling dasar "Kedaulatan ada di tangan Rakyat". Selain Aksi-aksi yang di sumbangkan warga PBB dalam Reformasi. Gagasan tersebut juga menjadi Gagasan PBB yang di sumbangkan PBB ke Negara Indonesia pad masa Reformasi yang manfaatnya bisa dirasakan sampai saat ini.[23]

---

[22] Daniel Dhokidue, "*Partai-partai Politik Indonesia Idiologi, strategi dan program*", Kompas, (13/8/1999);

[23] Cholid Novianto, *Era baru Indonesia*, 141 – 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

SEJARAH TERBENTUKNYA PARTAI BULAN BINTANG DAN PERKEMBANGAN PARTAI BULAN BINTANG MULAI TAHUN 1998 – 2004

A. Faktor – Faktor yang melatar belakangi lahirnya PBB

Lahirnya Orde Baru berawal setelah tumbangnya Orde Lama masa Presiden Soekarno. Berakhirnya kepemimpinan Soekarno dan pengalihan tugas kenegaraan ditandai dengan beberapa lembar kertas sacral tertanggal 11 Maret 1966, yang diserahkan kepada Mayjen Soeharto,lembaran kertas yang sampai sekarang masih diperdebatkan keabsahannya yang kita kenal sebagai "SUPERSEMAR" (Surat Perintah Sebelas Maret) Sejak saat itu Mayjen Soeharto tampil sebagai sosok Pemimpin baru, system politik di Indonesia dirubah menjadi system Demokrasi Pancasila. Salah satu kebijakan-kebijakan politik yang dibuat Soeharto yakni mengenai penyempitan partai politik. Dengan alasan partai politik hanya sebagai pesaing dalam memperoleh kekuasaan dan penggerak keresahan rakyat, khususnya partai politik Islam. Terbukti dengan seluruh Parpol islam yang ada pada waktu itu dirampingkan dalam sebuah partai persatuan pembangunan yang disingkat (PPP).

Sedangkan Pemerintah orde baru hanya percaya dan mendukung penuh Partai Golkar, karena Golkar karena Golkar dianggap Pemerintah sebagai kendaraan Politik yang mengantarkan Soeharto, menjadi penguasa, selain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alasan diatas Pemerintah orba menganggap Partai Golkar sudah bisa mewakili semua partai yang ada. Karena orang-orang yang bergabung dalam Golkar bukan halnya dari kalangan islam saja, tetapi dari berbagai agama yang ada di Indonesia saat itu seperti, Kristen Protestan, katolik, Budha dan Hindu. Orde baru yang dipimpin Soeharto berasas Pancasila tampaknya ingin menunggalkan asas dari semua lembaga, baik sosial, maupun politik, begitu pula partai politik yang berasas islam mau tidak mau harus tunduk dan patuh terhadap kebijakan Pemerintah Orba dengan bergabung menjadi satu dalam Partai Persatuan Pembangunan. Karna hanya PPP satu-satunya Partai Islam yang berasas tunggal Pancasila . Diantara Partai-partai islam yang bergabung yakni, Msyumi, Partai Syariat Islam Indonesia (PSII), partai Tharikat Islam, Permusi dan NU. Hal ini dilakukan pada tahun 1973.[24]

Pernyataan Parpol dan penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi PPP tahun 1984 hal ini menandai lenyapnya institusi politik islam dan menunjukkan surutnya politik Islam, selain faktor di atas ada beberapa faktor yang menjadi cita-cita generasi penerus partai Masyumi untuk meneruskan perjuangan Masyumi tanpa adanya tekanan dan paksaan dari Pemerintah.

(1) Keprihatinan para tokoh-tokoh eks Masyumi terhadap proses kristenisasi di Indonesia yang terjadi pada Era orba

(2) Birokratisasi Politik, dalam arti lain campur tangan Pemerintah dalam kehidupan politik terlalu besar. Tampak pada masa awasl orba berdiri,

[24] Sudirman Tebba, *Islam Orde Baru*, (Yogyakarta ; PT. Tiara Wacana Yogya, 1993) 4-5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah menolak para pemimpin Masyumi yang ingin memimpin kembali pada Partai Islam Imdonesia (Parmusi)

(3) Diferensiasi sosial yang menyebabkan kesadaran baru bagi umat. Perhatian umat terbagi-bago bukan saja bidang politik, yang sebelumnya diangap satu-satunya jalan untuk menyalurkan Aspirasi Rakyat, tetapi juga bidang-bidang lain. Proses mordernisasi dan pembangunan juga mempengaruhi perkembangan dan pergeseran pemikiran ideologis seperti cita-cita Negara Islam yang ideal kepada gagasan sistematik yang rasional

(4) Konsep Politik Islam yang kurang jelas dan lengkap. Orientasi Politik Islam adalah ditegakannya system Pemrintahan khilafah dan imamah. Tetapi kondisi bangsa Indonesia yang majemuk sangat sulit untuk mewujutkan hal ini. Ada hal-hal yang belum di cakup dalam pemikiran Politik Islam. Seperti distribusi kekuasaan, sebagai mana yang di kenal dalam konsep politik modern, system pengalihan kekuasaan, dan cara pembentukan pemerintahan. Hal ini juga menjadi sebab Umat Islam menerima Pancasila sebagai Dasar Negara, ketika Indonesia baru terlahir pada tahun 1945.[25]

Maka Pasca Orba Runtuh, Indonesia mengalami masa Reformasi dimana Partai Pilitik khususnya Parpol Islam serasa Bangkit kembali, dan kebebesan ruang untuk mendirikan Parpol Islam dengan mengungsung ideologi yang dianutnya dengan bebas dan tanpa tekanan. Salah satu Parpol Islam yang mengikuti Eforia tersebut yakni Partai Bulan Bintang.

---

[25] Ibid ; 300

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain faktor-faktor diatas yang melatar belakangi kelahiran PBB ada juga faktor Internal yakni PBB dianggap sebagai generasi penerus Masyumi, PBB prihatin atas gencarnya gerakan tansiriyah atau kristenisasi yang menghancurkan Aqidah Umat Islam pada era orba.[26]

B. Proses Berdirinya PBB

> "Partai ini berjuang untuk menegakkan sistem, bukan untuk memperjuangkan si A atau si B menjadi presiden. Yang penting kalau berbicara tentang Negara, maka harus menegakkan suatu sistem yang kuat. Dengan sistem yang kuat siapa saja dapat menjadi Presiden. Kalau presiden diganti, Negara tidak akan terpengaruh. [27]

Perjuangan untuk menegakkan suatu sistem yang kuat telah menjadi trade mark PBB sejak ia muncul pada musim reformasi Politik. Di antara partai-partai baru yang bermunculan pasca Soeharto lengser. PBB mempunyai ciri khas tersendiri. Apabila Partai-partai baru lahir karena dorongan eforia politik yang muncul seiring dengan dan berjalannya era reformasi, tapi PBB mempunyai perjalanan sejarah yang lebih panjang ke masa kejayaan politik orde baru. Sebenarnya kemunculan PBB telah lama di cita-citakan oleh tokoh-tokoh Islam terkenal, seperti : Dr. H.M. Natsir. KH. Masykur, KH. Rusli Abdul Wahid dan Prof Dr. H.M. Roszidi yang terhimpun dalam sebuah Organisasi FUI (Forum Ukhuwah Islamiyah). Forum ini didirikan pada tanggal 16 Dzulhijjah 1410 H, bersamaan dengan tanggal 1 Agustus 1989

---

[26] Hasan. *Memilih Partai Islam*,22.
[27] Zainal Abidin Amir, *Peta Islam Politik*, 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam rangka menyongsong datangnya 1 Muharram 1411 H. yang bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 1989. Berdirinya FUI dilatar belakangi oleh keprihatinanan para pemuka muslim dan juga parah tokoh nasionalis, atas gencarnya gerakan kanshiriyah (Kristenisasi) yang sudah menghancurkan akidah umat islam di Indonesia selama rezim orde baru berkuasa. [28]

Kehadiran FUI yang lebih mencerminkan sebagai kelompok kepentingan semakin kuat ketika pada tanggal 27 Jumadil Akhir 1414 H, bertepatan dengan tanggal 11 Desember 1993. FUI di kukuhkan kembali oleh para pemimpin Organisasi dakwah Islam tingkat Nasional sebagai tempat perjuangan dalam mempertahankan dan melestarikan Aqidah Islamiyah Umat Islam Indonesia. Diantaranya yaitu Dr. Anwar Harjono, SH. KH. Latif Muchtar, MA, Prof. Dr. Ismail Sunny,SH,MU, KH. Dadun Abdul Qohar, dan H. Nyddin Lubis.

Setelah pengukuhan selanjutnya di lakukan reorganisasi yang di lancarkan secara cepat sejak tanggal 8 Oktober 1994 hingga tanggal 18 Februari 1995 oleh Dr. Anwar Harjono, KH. Achmad Syaihu, Dr. Bustaman,SH, Ir. A. M. Luthy dan Geys Ammar. Upaya ini membuatkan hasil berupa bergabungnya 39 organisasi Dakwah (Orda) dan Ormas Islam tingkat Nasional, secara histories organisasinya dikenal sebagai pendukung dab anggota istimewah partai politik islam masyumi. Kepemimpinan FUI di pegang oleh 9 orang, ketuanya dipilih secara bergantian setiap enam bulan sekali dari orda dan ormas islam yang bergabung dengan FUI. FUI juga membuka cabang sejumlah provinsi termasuk di luar jawa.

---

[28] Zainal Abidin Amir, Peta Islam Politik, 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegiatan FUI selanjutnya adalah melakukan konsolidasi (penggabungan) organisasi silaturrohmi diantara para pendukungnya untuk menumbuhkan kalimatun sawa, melalui pertemuan yang dilaksanakan paling sedikit sebulan sekali. Untuk membahas perkembangan politik di Tanah Air khususnya yang berhubungan dengan kepentingan Umat Islam. Hasil dari diskusi-diskusi itu disampaikan kepada orang-orang yang dipandang dapat mempengaruhi proses pembuat kebijakan lewat lobi-lobi Tokoh FUI.

Dengan perkembangan politik yang begitu cepat, memunculkan pemikiran untuk meningkatkan peran FUI dalam menyuarakan kepentingan umat. Maka dari itu pada tanggal 15 Muharram 1419 H, bertepatan dengan tanggal 12 Mei 1998, FUI mengadakan pertemuan di rumah Anwar Harjono. Hasil dari pertemuan tersebut yaitu kesepakatan berdirinya Badan Koordinasi Umat Islam (BKUI) yang disepakati oleh tokoh-tokoh yang mewakili sebelas orda dan Ormas Islam tingkat Nasional. Sebelas Organisasi yang ikut dalam kesepakatan pembentukan BKUI diantaranya yaitu Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKPPI), Forum Silaturrohmi Ulama' Habaib dan Tokoh Masyarakat (FSUHTM), Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI), Persatuan Islam (Persis), Syerikat Islam (PSII). Persatuan Umat Islam (PUI). Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Al-Irsyad Al-Islamiyah (Al-Irsyad) dan Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI). Dengan bergabungnya sebelas organisasi tersebut, maka keanggotaan BKUI tidak bersifat perorangan seperti FUI tetapi kelembagaan atau organisasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pergolakan Politik saat itu memaksa BKUI menunjukkan sikapnya, terutama menyangkut tragedy Trisakti, kerusuhan masa dan mahasiswa pada tanggal 13-14 Mei 1998 dan pengunduran diri Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. karena itu, sejumlah Ormas Pemuda Islam yang bertemu di jalan Suwiryo dan Menteng Raya 58 Jakarta, secara spontan membentuk Komite Umat Islam untuk Reformasi Konstitusional. Pertemuan di kediaman Anwar Harjono pada tanggal 21 Mei 1998 mengakomodasi Organisasi itu sebagai satgas BKUI

Dalam Perkembangannya, BKUI mampu menarik banyak organisasi lainnya hingga berjumlah 40-an organisasi. Meskipun secara tertulis yang menyatakan diri sebagai anggota hanya tercatat 20-an Orda dan Ormas Islam. Sedangkan Anggota tambahannya antara lain Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI). Muhammadiyah (diwakili Lembaga Hikmah), HMI, PII, KB-PII, GPI, KB-GPI, Hidayatulloh, As – Syafiiyah, Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Badan Koordinasi Mubaliqh Indonesia (IKMI), Ihtihadul Muballighin, Forum Ukhuwah antara Kampus, dan Lembaga Penelitian Pengkajian Islam (LPPI) dll.

Para pendiri BKUI menginginkan BKUI bias menjadi wadah seperti Majlis Islam A'la Indonesia (MIAI) pada masa sebelum kemerdekaan. BKUI diharapkan bias merangkum, seluruh potensi Umat Islam yang terpecah-pecah guna menghadapi tantangan kedepan.

Harapan BKUI sangat selaras dengan Tujuan pembentukan BKUI yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menggalang kerja sama antara organisasi / lembaga Islam tingkat Nasional, memperkuat ukhuwah dan kebersamaan
2. Untuk mewakili umat islam Indonesia secara kaffah dalam bidang politik, ekonomi, hukum, social Budaya, dan dakwah.

Langkah-langkah BKUI berikutnya banyak di pengaruhi oleh Penyelenggara Musyawarah Nasional (Munas) 1 yang diadakan di kediaman Anwar Harjono pada tanggal 14 Juni 1998. Munas pertama berisi tentang keinginan BKUI untuk segera berubah menjadi sebuah Partai Islam yang baru, keinginan tersebut di tentang habis-habisan oleh kubu ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia).

Ahmad Tirto Sudiro yang waktu itu memimpin Munas sedang menjabat sebagai ketua ICMI mengelurkan ancaman yang isinya " kalau BKUI menjadi Partai, maka pertama kali yang mengundurkan diri dari BKUI adalah ICMI". Sementara itu pendapat lain menyatakan BKUI tidak usah menjadi Partai, tapi cukup dengan membenahi partai yang sudah ada. Setelah persilangan pendapat terjadi akhirnya bias diambil keputusan bahwa BKUI tidak akan menjadi Parpol, namun dapat mendirika. Parpol.

Sebelum keputusan tersebut diambil, jauh hari sebelumnya Anawar Harjono Tokoh terkemuka BKUI Pernah berkeinginan untuk membuat Partai Islam yang besar untuk menampung semua kalangan Umat Islam. Dengan melakukan pendekatan kepada PPP tetapi keinginan itu belum direspon oleh PPP, para pendukung BKUI sendiri kemudian merasakan PPP sulit untuk diajak kerjasama dikarenakan perdebatan unsur yang terus mewarnai Partai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akibat Pembentukannya merupakan campuran dari beberapa Partai Islam. Disamping itu juga kegagalan pendekatan Anwar Harjono terhadap PPP karena perangkat kelembagaan di PPP tidak menyediakan tempat yang sesuai bagi tokoh-tokoh BKUI jika bergabung dengan partai itu, Artinya PPP tidak bias secara serta merta memberi kedudukan penting dalam kepemimpinan Partai pada mereka tanpa terlebih dahulu menapaki karir dari bawah sesuai dengan mekanisme partai yang ada disini para Tokoh BKUI menilai sikap PPP ini tidak proposional karena mengingat kadar kekokohan dan pengalaman politik Pemuka-pemuka BKUI. Ketidak cocokan tawar menawar dua pihak tersebut menggugah minat keluarga Besar BKUI untuk merintis berdirinya sebuah Parpol Islam yang baru.

Upaya pembentukan Parpol Islam yang baru menunjukkan titik terang dengan digelarnya Munas II yang di lakasanakan pada tanggal 10 Juni 1998 di Kramat Raya 45 Jakarta. Keputusan yang disepakati dalam Munas II yakni ketentuan dasar BKUI, Badan Pekerja BKUI yang terdiri atas sebelas Orda dan Ormas Islam pendatanganan naskah pendirian organisasi tersebut,. Sekretaris Jendral (Ir. A.M.Luthfi) dan wakil sekretaris Jendral (Anawar Saleh) yang bertindak selaku administrator bagi kelancaran organisasi BKUI.

Berdasarkan kesepakatan pertemuan lanjutan Munas I dibentuk dua Tim. Pertama adalah "Tim Partai" yang di ketuai oleh Muhammad Sulaiman. Mewakili Anwar Harjono melakukan koordinasi. Kedua adalah " Tim sidang MPR " yang diketuai oleh Drs. Moh Cholil Badawi. Keanggotaan kedua tim itu dilengkapi pada tanggal 16 Juni 1998.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tim Partai juga disebut sebagai komisi politik BKUI. Selanjutnya BKUI mengakhiri rapat-rapatnya pada senin 13 Juli 1998 di Kramat Raya 45 Jakarta dengan hasil Lima kesepakatan mengenai prinsip yang akan di cantumkan dalam Anggaran Dasar (AD) Partai. Kelima kesepakatan itu adalah: 1. Nama Partai Bulan Bintang 2. Lambang Partai, yaitu Bulan Bintang Berwarna kuning emas dengan dasar Hijau lumut 3. Aqidah Islam, 4. Azas : Pancasila 5. Partai Pendiri : Tokoh-tokoh perorangan tetapi mencerminkan latar belakang Orda dan Ormas masing-masing. Adapun fungsi BKUI yaitu sebagai penyedia fasilitas bagi kelahiran Partai yang akan segera di deklarasikan, sehingga dengan demikian masih dapat menjaga hubungan dengan Partai Islam lainnya.

Pada awalnya Partai Islam yang akan didirikan akan diberi nama Partai Politik Islam Masyumi. Namun keinginan tersebut dibatalkan karena beberapa alasan.

1. Tokoh-tokoh Masyumi dimasa lalu dikenal mempunyai integritas pribadi yang tak tertandingi Generasi sekatang yang akan memimpin partai akan menanggung beban moral yang sangat berat apabila tidak mampu menjaganya, yang akan mencoreng nama baik Masyumi.
2. Selama ini keluarga Besar Bulan Bintang disebut dengan Keluarga Masyumi
3. Penggunaan simbul Bulan Bintang dimaksudkan untuk menggambarkan kesinambungan historis perjuangan islam Indonesia sejak berabad-abad silam, sejak kaum muslimin mulai tumbuh dan berkembang dimasyarakat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian berjuang mendirikan kesultanan-kesultanan Muslim, kemudian bertempur melawan penjajah, dan akhirnya bahu membahu dengan segala komponen kehidupan bangsa hingga mencapai kemerdekaan Pada tahun 1945, setelah itu dilanjutkan dengan perjuangan politik hingga sekarang, lagi pula masyarakat Islam pada umumnya seperti di Afrika Utara, Timur Tengah, Afrika Selatan maupun Asia Tenggara, Bulan Bintang Identik sebagai simbol Umat Islam.

Setelah Prinsip-prinsip tersebut disepakatiakhirnya penandatanganan Akrar Pendirian Partai Bulan Bintang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 1998 di Masjid Al-Furqon, Kramat Raya 45 Jakarta. Kemudian Pembacaan Deklarasi berdirinya Partai Bulan Bintang dilakukan di halaman Masjid Agung Al-Azhar, yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 1998.[29]

C. Perkembangan Partai Bulan Bintang (1998 – 2004)

Perkembangan PBB mulai terlihat pasca Pemilu 1999 dari hasil Pemilu menginformasikan bahwa, PBB cukup berakar di Jawa Barat, yang merupakan wilayah gerakan formalisme Islam yang dipelopori oleh A. Hassan ia adalah seorang tokoh terkemuka Persatuan Islam (Persis) yang cukup mendapat tempat dari Jawa Barat. PBB berhasil memperoleh 3 (Tiga) Kursi dari Jawa Barat, selain itu PBB mampu menggaet suara sebanyak 1 (satu) kursi masing-masing dari Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Sumatra Selatan. Perolehan kursi PBB dari Sumatra sebenarnya tidak terlalu mengejutkan bagi

[29] Ibid ; 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warga PBB, karena Sumatra merupakan daerah yang relatife maju dalam gerakan pemurnian Islam yang didukung sepenuhnya oleh warga Muhammadiyah. Dalam hal ini yang menarik adalah PBB berhasil memperoleh satu kursi dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan, karena ketiga daerah tersebut dikenal sebagai wilayah yang di dominasi oleh warga Nahdlotul Ulama' (NU). Ada kemungkinan perolehan kursi PBB yang didapat dari tiga daerah tersebut memang berasal dari komunitas NU yang tertarif dan sefaham dengan tawaran-tawaran politik PBB atau mungkin dengan performance figur ketua umumnya. Anggapan lainya yakni jumlah warga Muhammadiyah yang sefaham dengan garis politik PBB di ketiga daerah tersebut. Hal ini menunjukkan perkembangan secara kuantitatif.[30]

Berikut ini adalah Tabel Perolehan Suara dan Kursi PBB di Wilayah Provinsi.

No	Daerah Pemilihan	Jatah Kursi	PBB
1	Aceh	12	1
2	Sumut	24	1
3	Sumbar	14	1
4	Riau	10	-
5	Jambi	6	-
6	Sumsel -	15	1
7	Bengkulu	4	-

[30] Ibid ; 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8	Lampung	15	-
9	DKI Jaya	18	1
10	Jabar	82	3
11	Jateng	60	1
12	DIY	6	-
13	Jatim	68	1
14	Kalbar	9	-
15	Kalteng	6	-
16	Kalsel	11	1
17	Kaltim	7	-
18	Bali	9	-
19	NTB	9	1
20	NTT	13	-
21	Timur-Timur	4	-
22	Sulsel	24	1
23	Sulteng	5	-
24	Sulut	7	-
25	Sultra	5	-
26	Maluku	6	-
27	Irja	13	-
JUMLAH		**462**	**13**

Sumber . Panitia Pilihan Indonesia, Jakarta. 1 September 1999

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkembangan PBB Tahun 1998 – 2004 pasca Pemilu 1999 selanjutnya perkembangan Struktur Organsasi PBB yang meluas hingga ke pelosok-pelosok desa dan kecamatan, Struktur Organisasi PBB di bagi menjadi beberapa tingkat menurut cakupan luas kepemimpinannya, yang pertama pada tingkat Nasional ada Dewan pimpinan Pusat (DPP) kemudian Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) menadapat bagian kepemimpinan Partai di tingkat Provinsi / Daerah Tingkat I dan Kabupaten / Kota Madya / Daerah Tingkat II. Pada tingkat dibawahnya berdiri Pimpinan Anak Cabang yang kepemimpinannya meliputi kecamatan dan tingkat desa atau kelurahan yang di pimpin oleh Pimpinan Ranting. Kecuali di tingkat kecamatan dan desa / kelurahan, di setiap jenjang struktur Organisasi tampak kepemimpinan di pegang oleh dua unsur yang masing-masing mempunyai tugas dan wewenang berbeda. Sturktur Organisasi DPP (Dewan Pimpinan Pusat) terdiri atas Pimpinan Pusat dan Majlis Syuro, DPW terdiri atas pimpinan Cabang dan Majlis Pertimbangan Cabang. Struktur Kepemimpinan Organisasi ini merupakan modifikasi dari organisasi-organisasi yang mendukung PBB.[31]

Perkembangan dari struktur Organisasi yang paling menonjol yakni terjadi di DPP (Dewan Pimpinan Pusat) setelah membagi kepemimpinan organisasi hingga ke plosok Desa dan Kecamatan. Kemudian DPP melanjutkan dengan melengkapi tugas dan wewenang DPP sendiri, yang termasuk dalam tugas dan pimpinan pusat adalah :

---

[31] Anggaran Dasar PBB Pasal 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1). Menyelenggarakan Muktamar setiap 5 tahun sekali ; Mukernas dan Rokernas sekali diantara dua Muktamar ; (2). Membentuk departemen-departemen sesuai dengan keperluan sampai saat ini PBB mempunyai 21 Departemen yaitu : Departemen ekonomi, Departemen Luar Negeri, Departemen Koperasi, Departemen Tani dan Nelayan, Departemen Industri, Departemen Seni dan Budaya, Departemen Humas, Departemen Media Masa dan Pusat Informasi, Departemen Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Wanita, Departemen Lingkungan Hidup, Departemen Pendidikan, Departemen Kesehatan Masyarakat, dan Departemen Hubungan Antar Umat, [21] Setiap departemn dipimpin oleh seorang ketua dan sekurang-kurangnya seorang wakil ketua serta dapat dibantu oleh beberapa orang Anggota. Adapun yang tergolong ke dalam kewenangan DPP adalah : (1) dapat membentuk Cabang Istemewa Partai setelah mendengar pendapat pimpinan wilayah ; (2) dapat nenetapkan Anggota tambahan Majlis Syuro, Anggota tambahan ini tidak termasuk ke dalam susunan DPP, dan (3) DPP dapat menetapkan seorang atau beberapa orang sesepuh partau luar formasi DPP.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, pimpinan pusat di dampingi oleh majlis syuro yang berkewajiban memberikan fatwa dan atau pertimbangan, terutama kebijakan Partai yang menyangkut masalah syara' ; baik diminta maupun tidak. Anggotanya mencakup tokoh senior. Cendikiawan dan Ulama' yang jelas integritasnya. Untuk melancarkan tugas majelis syuro, seluruh tugas kesekretariatan dilakukan oleh sekretaris Dewan pimpinan partai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keberadaan majelis syuro dalam sturuktur Organisasi PBB ini menegaskan Ikatan Historis antara warga Bulan Bintang saat ini dengan para pendahulunya yang terkumpul dua partai politik islam masyuni.[32]

Perkembangan berikutnya meliputi kepemimpinan partai

Seperti yang dijelaskan di depan bahwa kelahiran PBB di naungi oleh BKUI yang menghimpun banyak organisasi dakwah (orda) dan organisasi masyarakat (ormas) Piagam deklarasi PBB sendiri ditanda tangani oleh 70 orang pendiri. Proses penandatanganan berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama tercatat tanda tangan 38 orang pediri, diikuti oleh 32 orang lagi pada tahap kedua. PBB memang mendirikan secara perorangan, namun kehadirannya di dukung 22 orda dan ormas yang bergabung dalam BKUI. Para Tokoh Orda dan Ormas ikut andil dalam pematangan kelahiran partai dan atau ikut menandatangani Partai.[33]

Kehadiran sejumlah organisasi tersebut, memang tidak bisa dipisahkan dari keinginan tokoh-tokoh partai, yang mengharapkan partainya menjadi wadah bersatunya seluruh elemen umat Islam Indonesia. Sebagaimana hal ini pernah di praktekkan oleh Masyumi diwaktu lalu. PBB akan menerima kelompok islam manapun untuk bergabung dengannya, tanpa mempermasalahkan corak keislaman dari tiap-tiap unsur yang beragam. Dalam partai dengan karakter semacam ini, pasti muncul sebuah kemajemukan. Ada keunggulan jika sebuah partai memiliki sebuah kemajemukan kelebihannya yakni memperkuat rasa demokrasi dalam Partai.

---

[32] DPP PBB, *Hasil Muktamar I Partai Bulan Bintang* (Jakarta ; DPP PBB, 1999) 118-122

[33] Anggaran Dasar PBB Bab II Pasal 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Langkah awal dari upaya menghargai kemajemukan sekaligus untuk meredam timbulnya konflik dalam tubuh Partai yaitu dengan cara memasukkan wakil-wakil dari organisasi pendukung partai ke dalam kepengurusan PBB pada Periode 1998 – 2003, yang penyusunannya dibuat dengan mandat. Cara ini membuat PBB mempunyai susunan pengurus yang sangat banyak, bahkan paling banyak armada pengurusnya dibandingkan partai-partai Islam yang ada.

Karena PBB menyakini semakin banyak pengurus yang menyebar keseluruhan plosok tanah Air maka semakin banyak jubir (juru bicara) PBB yang mengajak masyarakat untuk bergabung dalam partai.[34]

[34] Zainal Abidin Amir, *Peta Islam Politik*, 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

IDEOLOGI DAN PERJUANGAN PBB

1998-2004

A. Ideologi Partai Bulan Bintang 1988-2004

Partai Bulan Bintang yang berdiri pada 17 Juli 1998 sering kali disebut partai penerus Masyumi karena para tokoh di balik Pendiri PBB adalah eks aktivis Masyumi. Selain itu penggunaan simbol Bulan Bintang oleh PBB dimaksudkan untuk menunjukkan kesinambungan historis dengan perjuangan politik umat Islam di masa lalu, terutama dengan Partai Politik Islam Masyumi. Di satu hal ini mengindikasikan kedekatan psikologis diantara kedua partai yang berbeda zaman itu. Kemudian di sisi lain ada yang lebih penting yakni pernyataan secara tidak langsung dari PBB kepada masyarakat bahwa sejatinya partai inilah yang paling pantas dan memadai bagi warga masyumi dan penerusnya untuk dijadikan sebagai wadah yang menampung dan memperjuangkan aspirasinya. Pengungkapan secara simbolik maupun terang-terangan bahwa PBB memiliki hubungan emosional dengan Masyumi merupakan investasi paling berharga bagi PBB, dalam menghimpun kembali basis sosial yang pernah dimiliki oleh sebuah partai Islam yang besar dan disegani pada jamannya.[35]

Karena langkah yang diambil PBB untuk menarik massa dengan memanfaatkan keunggulan sejarah masa lampau di karenakan oleh Majone

[35] Zainal Abidin Amir , *Peta Islam Politik*, 72 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai teori optimalisasi terbatas, yaitu memanfaatkan secara optimal keberhasilan masa lampau untuk memperoleh tujuan masa kini.[36]

Seperti yang tercantum pada latar belakang skripsi ini, PBB lahir sebagai parpol Islam yang berakidah dan berasas Islam, PBB menambah ajaran-ajaran Islam yang universal untk membangun sistem perpolitikan baru yang didasarkan pada nilai-nilai Islam yang universal. Itu berarti PBB adalah wujud dari pemikiran modernisme politik Islam. Cita-cita PBB adalah menegakkan Syariat Islam di Indonesia. Bukan untuk mendirikan negara Islam yang bersistem Khilafah, karena warga PBB dan tokoh-tokohnya menyadari kalau hal tersebut sangat sulit diwujudkan, karena kondisi bangsa Indonesia yang majemuk. PBB bukan fundamentalis. Partai ini lebih mengutamakan etika Islam yang universal. Dan yang perlu di garis bawahi PBB menimbah inspirasi dari Masyumi, tapi bukan identik dengan Masyumi. Karena zaman sudah berubah, PBB tidak akan terlena dengan kenangan-kenangan kejayaan atau keberhasilan Masyumi. Tetapi PBB harus berjalan dan hidup pada zaman yang lebih modern dan berkembang jadi PBB harus menyesuaikan dengan keadaan zaman saat ini.[37]

Oleh karena itu perubahan pola fikir masyarakat Indonesia mengenai partai-partai Islam yang ada pasca Orde Baru perlu dirubah dan perlu diperjelas lagi terutama mengenai Partai Bulan Bintang. Kalau selama ini kebanyakan masyarakat Indonesia menganggap setiap Partai Islam, pasti bertujuan ingin mendirikan negara Islam yang bersistem Khilafah itu tidak

---

[36] Aminuddin, *Kekuatan Islam*, 86.

[37] Arief Budiman, Eep Saifulloh Fattah, Kuntowijoyo, Ulil Absar Abdalla, *Memilih Partai Mendambakan Presiden*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benar. Memang ada beberapa parpol Islam yang bertujuan mendirikan Negara Islam dengan sistem Khilafah tetapi tidak semua Parpol Islam bertujuan untuk itu salah satunya yakni PBB

Jadi hal ini dikatakan oleh Blumer sebagai Teori Transformasi Sosial (Perubahan Pola Fikir Masyarakat)

Adapun yang menjadi Pokok-pokok Ideologi Partai Bulan Bintang yang di tetapkan dalam muktamar I Partai Bulan Bintang tanggal 24 Muharram 1421 Hijriyah bersamaan dengan 29 April 200 Miladiyah di Jakarta mengeluarkan ketetapan Muktamar I nomor : 07/ TAP/ Muktamar I/2000 tentang tafsir asas yang berisi 36 butir, 36 diantaranya menegaskan :

1. Asas Islam bagi Partai Bulan Bintang dalam segala kegiatannya berpedoman kepada petunjuk Islam yang hanif
2. Akidah Islam bagi Partai Bulan Bintang bermakna bahwa setiap anggota partai dengan sungguh-sungguh meyakini Ke-Esaan Alloh sebagai Tuhan yang satu-satunya, yang patut dan wajib di sembah, dan diperhatikan seruan dan larangannya.
3. Oposisi yang dikembangkan oleh Partai Bulan Bintang adalah dari konsep amar ma'ruf nahi munkar. Maka kebijakan oposisi partai menantang semua yang munkar (buruk dan jahat) dan mendukung semua yang ma'ruf (baik) darimanapun datangnya, karena yang batil tetap batil (salah) dan yang hak tetap hak (kebenaran bagaimanapun bentuknya).
4. Akhlak Islam adalah norma-norma universalm berkenaan dengan apa yang baik dan buruk hak dan batil, ma'ruf dan munkar. Kaedah akhlak paling

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendasar yang harus dipegang teguh oleh setiap pengurus dan kader Partai Bulan adalah kewajiban untuk bersikap dan berlaku adil, menegakkan keadilan dan melenyapkan kezaliman sebagai bagian integral dari perjuangan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar yang diperintahkan oleh Islam. Pelaksanaan menentang kezaliman melalui saluran-saluran yang sah, demokratis serta mendukung tinggi norma-norma akhlak, hukum, dan konstitusi.

Dan harapan partai Bulan Bintang yakni, semoga pokok-pokok tafsir asas yang juga menjadi ideologi Partai Bulan Bintang yang dirumuskan ini dapat memberikan arahan dan pedoman dalam membina dan mengembangkan Partai di tengah-tengah masyarakat Indonesia.[38]

B. Perjuangan Partai Bulan Bintang Tahun 1998 – 2004

Latar Belakang Perjuangan PBB 1998-2004

Piagam Jakarta merupakan Perjuangan Konstitusional yang semula akan dijadikan sebagai naskah Proklamasi Negara Indonesia oleh para pendiri bangsa. Dan 'elah di sepakati dalam sidang BPUPKI sebagai landasan konstitusi NKRI. Konsep Piagam Jakarta merupakan hasil kompromi dari keinginan mendirikan Negara Islam dari kaum muslimin, dan keinginan mendirikan Negara Sekuler dari kaum Nasionalis pada saat-saat terakhir menjelang Proklamasi. Tapi sayangnya, naskah tersebut dicoret secara

[38] Dewan Pimpinan Pusat PBB, *Tafsir Asas Partai Bulan Bintang* (Jakarta:2000)V.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepihak tanpa melalui sidang oleh kelompok kaum Nasionalis dengan tidak menghiraukan keputusan musyawarah.

Proklamasi Negara Indonesia akhirnya disampaikan dengan naskah perorangan yang dibuat secara terburu-buru. Inilah yang mengakibatkan kaum muslimin di Indonesia dalam menjalankan syariat agamanya tidak memiliki pedoman hukum secara nasional. Terutama menyangkut hukum-hukum peradilan, ini kewajiban negara untuk menegakkan hukum tersebut kepada warga negaranya yang muslim, namun demikian, kaum muslimin masih dapat menjalankan syariat agama secara terbatas hanya pada perkara-perkara hukum perorangan.

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, NKRI yang mayoritas penduduknya beragama Islam syariat Islam telah tumbuh dan berkembang, serta dijadikan anutan di masyarakat. Demikian pula dengan pokok hukum setingkat UU, banyak yang mengatur kehidupan yang khusus diberlakukan bagi umat Islam seperti UU Perkawinan, UU Zakat, UU Perbankan Syariah, dan lain-lain. Yang terbukti tidak menimbulkan gejolak atau mengganggu umat agama lain.[39]

Dalam perjalanan sejarah, upaya mengembalikan Piagam Jakarta sebagai konstusi telah beberapa kali diupayakan. Misalnya pada sidang konstituante dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang menjadi dasar berlakunya kembali UUD 1945. Secara tegas dijiwai oleh Piagam Jakarta.

---

[39] Dewan Pimpinan Wilayah PBB Jatim, *Khitiah Perjuangan PBB dan Perjuangan PBB dalam menegakkan syariat Islam* (Surabaya : 2005) 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengembalikan tujuh kata dalam Piagam Jakarta ke dalam amandemen Batang Tubuh UUD 45 pasal 29 merupakan upaya memberikan kerangka konstitusional terhadap beberapa UU dan tata kehidupan masyarakat muslim Indonesia yang selama ini sudah berjalan tanpa adanya dasar konstitusi yang menaunginya.

Dalam era keterbukaan ini dimana kebebasan berpolitik telah di buka seluas-luasnya, termasuk untuk mendirikan Partai Politik, maka bagi kaum muslimin momentum ini merupakan kesempatan untuk kembali memperjuangkan payung konstitusional bagi berlakunya ketentuan dimana negara berkewajiban untuk menegakkan syariat Islam bagi pemeluknya untuk perkara-perkara hukum peradilan.

Bagi kaum muslimin, menerapkan syariat Islam oleh individu dan menegakkan Syariat Islam oleh negara adalah wajib hukumnya. Perjuangan penegakkan syariat Islam oleh Negara dijalankan dengan mekanisme, melalui alat berupa partai politik. Tanpa melalui parpol perjuangan ini tidak dapat dilakukan, mendirikan parpol hanya merupakan alat bagi terlaksananya syariat Islam oleh negara. Sebab mendirikan parpol itu bukan tujuan, yang menjadi tujuan adalah penegakan syariat, supaya negara Indonesia tidak tersesat pada ideologi-ideologi yang jauh dari ideologi masyarakat kaum muslimin sebagai penduduk mayoritas di Negara Indonesia.

Perjuangan Partai Bulan Bintang, untuk menegakkan syariat Islam oleh negara, dilakukan melalui lembaga-lembaga negara khusunya lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Perjuangan ini sebagai gerakan struktural

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang melalui proses transformasi informasi dan pengetahuan serta pemberdayaan masyarakat sebagai gerakan budaya.

Fraksi Partai Bulan Bintang sebagai kepanjangan tangan Partai Bulan Bintang telah berikhtiar untuk mengembalikan tujuh kata Piagam Jakarta dalam amandemen batang tubuh UUD 45 pasal 29. Hal itu penting sebagai upaya untuk memberikan kerangka konstitusi terhadap beberapa Undang-Undang dan Tata Kehidupan Masyarakat Muslim Indonesia yang selama ini sudah berjalan tanpa adanya dasar konstitusi yang menaunginya.[40]

C. Memperjuangkan Syariat Islam

Sebagaimana halnya pada sidang tahunan MPR tahun 2000, fraksi PBB MPR RI pada sidang tahunan 2001 mengerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya melalui perdebatan lobi dan pembentukan opini memperjuangkan pentingnya kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 berakhir tanpa menyentuh perubahan pasal 29 UUD 1945. Kondisinya tidak begitu beda dengan Sidang Tahunan MPR Tahun 2000. Dan kesempatan terakhir mengamandemen pasal 29 UUD 1945 tersebut, tinggal pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2002. Pihak-pihak yang tidak mau kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya diterapkan di Indonesia satu persatu mulai secara terang-terangan menyatakan penolakannya.

Hambatan terbesar yang dihadapi oleh Fraksi PBB baik di dalam persidangan maupun di tingkat opini, justru datang dari kalangan yang

[40] Ibid, 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beragama Islam khususnya dari Pimpinan NU dan Pimpinan PP Muhammadiyah yang secara agresif menyuarakan penolakan pemberlakuan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sementara di lingkungan non muslim khususnya Anggota MPR RI non muslim justru dapat memahami pemberlakuan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Namun dengan pernyataan sikap tersebut, fraksi PBB menegaskan bahwa perjuangan menegakkan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya akan terus dilaksanakan dan tidak akan berhenti dengan berakhirnya pelaksanaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2002.

Partai Bulan Bintang yang mengusulkan perubahan pasal 29 ayat (1) yang berbunyi, "*Negara berdasarkan Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*", mempunyai tiga alasan.

Pertama, usul ini hanyalah konsisten dan wujud pelaksanaan amanah pendahulu negeri ini, pada saat diberlakukannya UUD dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, dimana dalam Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, dimana dalam bagian tak terpisahkan dari UUD 1945 yang diberlakukan. Untuk itu penambahan tujuh kata dalam pasal 29 ayat (1) hanyalah penjabaran dari maksud pemberlakuan UUD 1945 itu.

Kedua, ajaran agama manapun dan khususnya Syariat Agama Islam mengajarkan dan memerintahkan kebaikan, akhlak yang mulia, larangan berbuat kejahatan dan kerusakan di muka bumi, penghormatan kepada penganut Agama dan bangsa lain, dan segala hal mengenai kebaikan. Untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu sebagian bangsa Indonesia yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, akan lebih baik jika benar-benar memahami dan menjalankan ajaran agamanya. Jadi penambahan ayat ini adalah salah satu solusi untuk memecahkan kemunduran moral bangsa yang sekarang ini dan ke depan.

Alasan ketiga, PBB tidak bermaksud untuk memberlakukan syariat Islam ini kepada mereka yang tidak beragama Islam, serta membatasi ajaran dan penganut agama-agama lain.PBB memberikan jaminan bahwa agama lain akan bebas hidup di bumi pertiwi ini, dan para penganutnya bebas menjalankan ajaran agamanya.[41]

PBB memberikan penegasan kembali kepada para anggota yang hadir dalam Sidang Tahunan MPR 2002, setiap penyebutan Piagam Jakarta maksudnya adalah tujuh kata-kata dalam Piagam Jakarta yang berulang-ulang dikemukakan. Tujuh kata-kata tersebut yang di usulkan untuk ditambahkan pada pasal 29 ayat 1. Dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 disebutkan bahwa Piagam Jakarta itu adalah sesuatu yang menjiwai dan tidak terpisahkan dengan UUD. Jiwa itu selama ini gentayangan tanpa bentuk, sehingga usulan PBB agar Piagam Jakarta dimasukkan kembali ke dalam UUD 1945 hanya ingin memberikan tempat kepada jiwa yang selama ini gentayangan dalam bentuk yang konkret, supaya memberikan berkah yang lebih besar bagi bangsa dan negara Indonesia PBB sangat menyadari banyak pihak-pihak yang merasa khawatir dengan penyatuan tujuh kata tersebut ke dalam pasal 29 ayat (1). Karena seolah-olah dengan membicarakan Piagam Jakarta akan

[41] Ibid, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebabkan terjadinya disintegrasi atau pemisahan kesatuan NKRI. Padahal itu semua sangat tidak benar, menurut pengamatan PBB sejauh ini Piagam Jakarta tidak pernah menjadi penyebab terjadinya disintegrasi nasional. Hal ini hanya khayalan orang-orang yang tidak senang dengan tegakknya Islam di bumi pertiwi ini. Selain itu memang secara sistematis upaya marginalisasi Syariat Islam ini telah dilakukan oleh para orientalis dan pengikut mereka yang sekuler, dengan membentuk opini publik, seolah-olah syariat Islam itu kejam dan tidak berperikemanusiaan sehingga terjadi stigma terhadap syariat Islam.

Di Indonesia upaya ini dilakukan sejak Zaman Christian Snouck Hurgronje seorang orientalis Belanda yang menjadi penasehat Pemerintah Hindia Belanda Indonesia. Dengan menggunakan Teori Resepsinya ia dapat mengganti berlakunya Hukum Islam dengan Hukum Adat. Dengan dalih "Hukum Islam baru berlaku bila diterima oleh Hukum Adat". Padahal jauh sebelum Belanda masuk ke Indonesia, hukum Syariat Islam telah berlaku di Kerajaan-Kerajaan Islam, mulai dari Aceh sampai Ternate dan Tidore. Bahkan di Zaman Belanda s`belum kedatangan Christian Snouck Hurgronje ke Nusantara Syariat Islam diberlakukan bagi penduduk pribumi yang beragama Islam.

Hal ini terbukti dengan didirikannya pengadilan agama tahun 1882 yang memutuskan perkara diantara umat Islam oleh hakim yang beragama Islam, dan adanya Compandium Preider yang menghimpun putusan pengadilan Agam tersebut sehingga seorang ahli hukum Islam di zaman itu yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bernama WC.Van Den Berg membuat sebuah teori yang sangat terkenal, yaitu teori *Receptio in Complexe* "Hukum Islam diberlakukan secara keseluruhan bagi penduduk pribumi yang beragama Islam".

Namun setelah kedatangan Christian Snouck Hurgronje sebagaimana disebutkan di atas, politik Hukum Hindia Belanda berubah dan disesuaikan dengan teori resepsinya. Christian, sebagai perlawanan terhadap teori Resepsi WC. Van Den Berg seorang ahli hukum Islam mencetuskan Teori *Receptio In Complexu*. Dan sampai saat ini pengaruh Teori Resepsi Christian masih terasa di bidang hukum. Pada zaman Orba upaya pembaharuan di bidang hukum nasional menjadikan Syariat/ Hukum Islam sebagai salah satu bahan baku hukum nasional disamping hukum adat dan Hukum Barat. Namun pada era reformasi politik hukum di Indonesia telah mengalami kemunduran jika dibandingkan dengan zaman Hindia Belanda dan rezim Orde Baru. Yang memberlakukan sebagian hukum Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi menurut PBB saat inilah momentum yang tepat dan sidang MPR yang PBB gunakan sebagai forum untuk meluruskan sejarah dan menghilangkan stigmatisasi terhadapa Syariat Islam yang telah banyak disalahpahami oleh banyak pihak dengan membentuk politik hukum Nasional yang mentrasnformasikan nilai-nilai dan norma-norma hukum yang hidup di tengah masyarakat.

Fraksi PBB berpendapat bahwa penambahan tujuh kata dari Piagam Jakarta pada pasal 29 ayat 1 semata-mata dimaksudkan dan ditujukan kepada kewajiban negara untuk melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam. Karena memang ada bagian dari syariat itu yang tidak dapat dilaksanakan secara pribadi melainkan dituntut artikulasi peran negara sebagai suatu keharusan untuk melaksanakannya. Jadi pemberlakuan syariat Islam oleh sebuah negara didasari oleh pandangan bahwa negara dan agama tidak dapat dipisahkan. Dan tidak mungkin seluruh aspek ini bisa ditegakkan dengan baik tanpa keterlibatan negara yang memiliki kekuasaan untuk menegakkan aturan-aturan hukum syariah yang ada. Selain itu juga syariat Islam yang menyangkut Jinayat (pidana Islam), hukum Muammalah (perdata Islam) tidak akan bisa berdiri jika tidak ada suatu pengadilan yang dibentuk oleh negara untuk menegakkan hukum tersebut.

Usulan-usulan PBB untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia bukanlah upaya mengesampingkan pluralisme kehidupan berbangsa dan bernegara, serta langkah ke arah singularisme berbangsa. Tidak ada niatan PBB seperti itu. Karena berlakunya syariat Islam hanya ditujukan kepada mereka yang beragama selain Islam. Karena itu PBB tetap menghormati pluralisme dan kemajemukan bangsa Indonesia.

Walaupun hingga Sidang Tahunan MPR 2002 berakhir, perjuangan PBB mengenai penegakan syariat Islam di Indonesia belum bisa di terima oleh seluruh anggota majelis sidang tahunan MPR. Perjuangan tersebut tidak akan berhasil sampai disitu saja. Jika ada kesempatan PBB tetap akan memperjuangkan hal yang sama.[42]

---

[42] Ibid, 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Program Perjuangan Partai Bulan Bintang Tahun 1998-2004

Mengenai program perjuangan partai terbagi menjadi dua yang pertama internal dan yang ke dua eksternal.

Program Eksternal Partai

1. Pemberdayaan Organisasi dan Kaderisasi

Melakukan reorientasi terhadap visi dan misi partai bagi seluruh keluarga besar Bulan Bintang secara Nasional melalui orientasi kepengurusan partai yang disingkat OKP. Konsolidasi organisasi dilakukan sampai tingkat Ranting yang paling bawah, RW dan RT antara lain dengan menyelenggarakan Pesantren Modern Terbuka disingkat PMT. Kemudian mereformasi struktur organisasi partai yang efektif dan efisien, dan juga melakukan kajian ulang terhadap konsep sistem dan pelaksanaan kaderisasi Partai secara nasional untuk membentuk dan meningkatkan pemberdayaan badan-badang non struktural partai, guna memperluas basis massa dan dukungan terhadap partai. Antara lain dengan membentuk lembaga-lembaga swadaya masyarakat disingkat LSM. Merumuskan dan mewujudkan sistem dan mekanisme komunikasi dan silaturahmi yang efektif pada lingkungan partai secara nasional.

2. Dakwah dan pembinaan Akhlakul Karimah

Melakukan kajian-kajian keislaman di setiap tingkatan kepengurusan partai. Menyusun konsep dan metode dakwah yang efektif dan melaksanakannya secara sistematis terprogram. Memelihara serta mengembangkan Ukuwah Islamiyah dengan memperbanyak potensi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

subyek dan obyek dakwah. Memprakarsai dan melaksanakan pertemuan antar lembaga-lembaga dakwah untuk menciptakan syiar Islam. Membangun silaturrahmi dengan ormas Islam untuk memperkuat basis partai. Khususnya ormas yang mendukung berdirinya partai. Membangun dan mengembangkan jaringan dakwah.[43]

3. Pemberdayaan Ekonomi Anggota

a. Membuka ruang dan kesempatan dengan membuka akses bagi pengembangan usaha semua kader partai.

b. Membangun jaringan networking pengusahan kader partai secara nasional.

c. Membangun pusat informasi dan komunikasi usaha bagi pengusaha kader partai.

d. Mendorong terbentuknya lembaga permodalan dan/atau lembaga penjamin simpanan bagi pengembangan usaha ekonomi kader partai.

e. Menciptakan Lapangan Kerja dan usaha produktif yang halal.

4. Pemberdayaan Generasi Muda

a. Mendorong dan mendukung sepenuhnya usaha-usaha Pemuda Bulan Bintang dalam membina dan memberdayakan generasi muda serta memperluas basis dukungan partai dari kalangan pemilih muda dan pemilih pemula.

---

[43] Ibid, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mendorong dan memberikan kesempatan lebih luas kepada generasi muda untuk memimpin partai dan menjadi pejabat publik dari partai.

c. Mendorong dilakukannya regenerasi kepemimpinan partai secara konsisten dan terus menerus.

d. Mengadakan pelatihan ketrampilan berbasis teknologi informasi.

5. Pemberdayaan Perempuan

a. Pembinaan dan pengembangan potensi perempuan secara maksimal dalam wadah khusus, melalui penugasan dalam berbagai aktivitas partai.

b. Memperluas kesempatan bagi kader perempuan (muslimat) berperan lebih besar dalam kiprah partai sesuai dengan syariat Islam.

c. Melindungi kaum perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga dan masyarakat.

d. Meningkatkan advokasi dan hak-hak kaum perempuan yang bekerja di dalam maupun luar negeri.

6. Pembinaan dan Pengembangan Profesi

a. Melakukan upgrading dan pelatihan terhadap partai yang mengemban amanah sebagai pejabat publik.

b. Melakukan rekrutmen para akademisi dan profesional untuk berkiprah dalam badan khusus partai antara lain, Dewan Pakar, Badan Penelitian dan Pengembangan dan lain serta mendukung penuh pemberdayaan badan-badan khusus tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menyusun dan mendorong tegaknya kode etik baik bagi anggota dan fungsionaris Partai maupun Anggota Legislatif dan Pejabat Publik yang difasilitasi partai, dengan membentuk dan memberdayakan Badan Kehormatan / Majelis Pertimbangan di setiap tingkatan kepengurusan Partai dan Majelis Syuro di tingkat DPP, sebagai Badan Peradilan bagi tindakan penyimpangan terhadap kaidah-kaidah Partai.

d. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga profesi dalam bentuk forum kajian, pemberian beasiswa dan penempatan tugas.[44]

Program Eksternal Partai

1. Pertahanan, Luar Negeri dan Informasi

a. Memperjuangkan tersusunnya Undang-undang tentang wiiayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta penyompurnaan Undang-undang tentang pertahanan dan keamanan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Merumuskan konsep sistim pertahanan dan keamanan untuk menjaga kepentingan dan perlindungan masyarakat dan bangsa Indonesia, menjaga kedaulatan wiiayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Mendorong peningkatan kualitas keprofesionalan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat keamanan negara.

d. Memperjuangkan peningkatkan sarana, prasarana dan teknologi pertahanan keamanan serta kesejahteraan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

---

[44] Ibid,14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Mendorong arah kebijakan luar negeri dan kekuatan diplomasi untuk kepentingan nasional, yaitu kepentingan untuk memiaertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari campur tangan asing dan juga untuk menyelesaikan masalah perbatasan dengan negara-negara tetangga.

f. Mendorong arah kebijakan luar negeri dan kekuatan diplomasi untuk kepentingan ekonomi nasional yaitu meningkatkan perdagangan, investasi serta perbaikan perlindungan tenaga kerja kita di luar negeri.

g. Memelihara dan mengembangkan kebijakan politik luar negari yang bebas aktif yang bertumpu pada kedaulatan bangsa, negara dan kehormatan bangsa serta kepentingan nasional Indonesia.

h. Mengembangkan politik perdamaian dan kerjasama Internasbnal dengan bertumpu pada nilai-nilai kemanustaan universal dan kesamaan derajat negara.

i. Memperjuangkan pelaksanaan undang-undang penyiaran dan kebebasan pers secara optimal.

j. Mendorong dan mensponsori kehidupan pers yang bebas dan bertanggung jawab pada terlaksanarrya kode etik jurnalistik.

k. Mensponsori usaha-usaha penghentian dan pelarangan segala macam tayangan dan cetakan yang menyiarkan pornografi, pornoaksi, kekerasan, mistik dan hal-hal lainnya yang menjadi penyebab munculnya penyakit sosial di masyarakat.

l. Menentang segala bentuk kolonialisme, imperialisme, kapitalisme, penindasan, dominasi dari negara manapun serta tdk memberi pengakuan terhadap eksistensi negara kolonial penjajah dimensinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Aparatur Negara dan Agraria**

   a. Memperjuangkan terselenggaranya pemerintahan yang berwibawa, kuat bersih dan terhindar dari KKN.

   b. Memperjuangkan berkembangnya budaya politik yang sehat dan demokratis dengan melakukan transformasi nilai-nilai Islam.

   c. Memperjuangkan terlaksananya syariat Islam dalam skala lokal, baik itu pada tingkat kabupaten dan kota maupun pada tingkat propinsi, yang terakomodir dalam bentuk Perda.

   d. Mendorong seluruh jajaran pengurus Partai Bulan Bintang untuk mengambil peran aktif dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung.

   e. Memperjuangkan terbentuknya Komisi Pengawasan Pelaksanaan Subsidi untuk rakyat.

   f. Memperjuangkan kemudahan pemberian ijin atau kerjasama penggarapan lahan-lahan kritis dan lahan tidur bagi kepentingan ekonomi rakyat.

   g. Memperjuangkan kemudahan sertifikasi tanah khususnya tanah wakaf dan hibah.

3. **Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan**

   a. Memperjuangkan program pembangunan pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan sebagai basis strategi pengembangan ekonomi nasional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mendorong dan memantapkan pola ekonomi nasional yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

c. Meningkatkan optimalisasi sumber daya alam pertanian dan kelautan serta teknologi tepat guna untuk mengembangkan produktivitas ekonomi nasional.

d. Mengarahkan program pengembangan pertanian sebagai basis strategi ekonomi nasional untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia.

e. Memperjuangkan kemudahan akses permodalan dan jaringan pasar bagi pengembangan usaha kecil dan menengah.

f. Memperjuangkan peningkatan standar hidup dan kesejahteraan petani dan nelayan

4. **Hukum dan Perundangan-undangan, HAM dan** Keamanan[45]

a. Memperjuangkan transfomasi nilai - nilai Islam dalam peraturan peraturan perundang-undangan.

b. Mendorong peningkatan kualitas, wawasan dan moral aparat penegak hukum secara nasional.

c. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya keamanan nasional melalui penumbuhan minat bela negara, semangat nasionalisme dan wawasan nusantara.

---

[45] Ibid 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan peraturan perundangan secara konsisten oleh berbagai pihak terhadap pornografi, pornoaksi dan narkoba.

e. Mendesak Pemerintah dan DPR supaya memperkuat kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Undang-Undang,

f. Mendukung tegak dan terlaksananya syariat Islam di Nangroe Aceh Darussalam sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Perhubungan, Telekomunikasi, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal

a. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan sebagai urat padi aktifitas kehidupan masyarakat.

b. Memperjuangkan pembangunan fasilitas perumahan bagi rakyat kecil dan menata pemukiman kumuh dengan pola pendekatan persuasif.

c. Mendorong dan memperjuangkan pemberian *treatment-treatment* khusus untuk menjadi *stimulus* percepatan pembangunan di kawasan daerah.

d. Memperjuangkan pembangunan sarana dan prasarana dikawasan pedesaan dan kawasan tertinggal, terutama di daerah terpencil, di pulau-pulau serta daerah pedalaman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Mendorong peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi global dengan:

1) Mewujudkan sistem dan mekanisme komunikasi serta silaturahmi yang efektif pada lingkungan secara langsung.
2) Mentransformasikan segala kegiatan, gagasan, sikap dan perjuangan partai pada masyarakat
3) Menerbitkan media bacaan baik majalah, buletin, atau warta Abadi.

6. **Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Seni dan Budaya**

a. Mengawasi pelaksanaan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dan mencermati penyusunan peraturan pelaksanaannya.

b. Memperjuangkan dan melakukan pengawasan pelaksanaan sekolah bebas biaya dan realisasi alokasi anggaran pendidikan sebesar 25 % dalam APBN.

c. Mendorong peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dan pesantren terutama dalam mengembangkan model pendidikan terpadu yang berwawasan Imtak dan Iptek.

d. Memperjuangkan peningkatan kapasitas, profesionalitas dan kesejahteraan tenaga pendidikan sehingga tercipta keharmonian dalam menjalankan tugas pendidikan.

e. Mendorong Islamisasi ilmu pengetahuan yang diharapkan di masa mendatang dapat menjadi bagian dari kurikulum pendidikan nasiortal yang melahirkan insan kamil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat pentingnya persamaan derajat sebagai manusia, kedisiplinan dan meningkatkan ketertiban sebagai budaya masyarakat baru dan modern.

g. Ikut serta dalam mengembangkan pariwtsata, seni dan budaya yang bernafaskan Islam.

h. Melakukan pembinaan generasi muda dengan model pendidikan, pelatihan dan up-grading, di berbagai profesi. Sekaligus menumbuhkan jaringan kerja sama antar pemuda ditingkat nasional dan internasional.

i. Mendorong peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini dan memperjuangkan sarana dan prasarananya.

j. Memperjuangkan terbebasnya generasi muda dari bahaya narkoba, pergaulan bebas, dan penyakit kejiwaan lainnya yang mempunyai dampak negative terhadap perkembangan generasi muda melalui peningkatan peran serta dan kesadaran remaja dalam kegiatan masjid dan keislaman lainnya.

7. Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM dan BUMN

a. Memperjuangkan kebijakan perdagangan dalam dan fuar negeri untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha kecil dan menengah.

b. Memperjuangan penguatan struktur ireclustri nasional yang berbasis pada penggunaan bahan baku lokal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Mendorong terciptanya kerjasama Internasional yang bertumpu pada kesamaan derajat dan saling menguntungkan dalam bidang perdagangan,

d. Menperjuangkan iklim investasi yang kondustf melatui pemberian insentif, penyederhanaan proses perijinan dan kebijakan investasi yang progrwsif serta jaminan keamanan dan kepastian hukum.

e. Mendorong pengelolaan BUMN berdasarkan prinsip-prinsip *good corporate governance* serta mencegah penjualan BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak.

8. **Energi, Sumber Daya Mineral, Riset Teknoiogi dan Lingkungan Hidup**[46]

a. Mendorong pemanfaatan secara optimal. Bioteknologi untuk kepentingan petani, nelayan, buruh dan masyarakat umum lainnya.

b. Memperjuangkan pengaturan pengetahuan dan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral dengan basis pelestarian Ijngkungan hidup

c. Memacu pertumbuhan lembaga-lembaga riset dan penelitian, khususnya dunia pendidikan dan umumnya organisasi kemasyarakatan sehingga menjadi tradisi dan budaya dalam setiap perilaku dalam kehidupan. Memperjuangkan dan mengembangkan program-program Bioteknologi yang bertanggung jawab bagi kepentingan petani, nelayan, buruh dan masyarakat umum.

---

[46] Ibid 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Menciptakan dan membangun lingkungan hidup yang harmoni, teratur, tertib, sehat dan bersih dengan membuat undang-undang atau peraturan daerah untuk itu.

9. **Agama, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan**

a. Memperjuangkan penyusunan undang-undang yang mengatur hubungan antar umat beragama, termasuk pengaturan penyiaran agama untuk kerukunan umat beragama dan stabilitas nasional

b. Membendung paham-paham keagamaan yang berkembang dalam masyarakat yang bertentangan dengan tuntunan Rasulullah

c. Memperjuangkan suatu sistem jaminan sosial nasional bagi fakir miskin, anak-anak terlantar dan jompo.

d. Mendorong pengelolaan penanggulangan bencana alam, secara responsif, transparan dan akuntabel.

e. Mendorong penguatan peranan perempuan dibidang poleksosbud yang dilandasi dengan nilai nilai Islam

f. Memperjuangan pengelolaan ibadah haji yang transparan, akuntabel dan murah.

10. **Kependudukan, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**[47]

a. Mendorong peningkatan program-program kependudukan yang terencana untuk terciptanya keluarga sakinah, mawadah warahmah.

---

[47] Ibid 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. b. Memperjuangkan pemerataan penyebaran penduduk dan pengurangan urbanisasi dari desa ke kota-kota besar dengan menciptakan lapangan kerja di daerah.

c. Memperjuangkan jaminan national perlindungart kesenatan masyarakat, khususnya fakir miskin.

d. Memperjuangkan tumbuh kembangnya industriobat tradisional yang berbasis tanaman rakyat.

e. Memberikan kemudahan pelayanan dan proses admintstrasi serta perizinan bagi tenaga kerja Indonesia,

f. Memperjuangkan kepastian hukum, kemudahan perizinan, kesejahteraan dan asuransi dalam perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

g. Memperjuangkan pemisahan antara regulator dan operator dalam penanganan penempatan tenaga kerja diluar negeri.

h. Penyempurnaan program transmigrasi berbasis ekonomi yang berkesinambungan.

11. Keuangan, Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

a. Memperjuangkan penyusunan peraturan perundang-undangan perbankan syariah dan lembaga keuangan bukan bank yang berdasarkan prinsip syariah dan lembaga keuangan bukan bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

b. Memperjuangkan penggunaan mat uang emas dan perak sebagai salah satu alat tukar dalam perdagangan dalam negeri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Memperjuangkan perubahan undang-undang perbankan yang lebih memperhatikan usaha kecil.

Semua program perjuangan ini di harapkan mampuu mangakomodasi aspirasi warga Bulan dan Bintang yang tumbuh secara nasional dan sekaligus aspirasi pluralitas masyarakat Indonesia serta kepentingan misi partai untuk mencapai tujuan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Serta inilah Khittoh perjuangan Partai Bulan Bintang yang merupakan program perjuangan, yang menjadi dasar bagi pencapaian tujuan umum dan khusus yang diluapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.[48]

Sedangkan, program khusus yang dikembangkan Partai Bulan Bintang, diantaranya bidang kenegaraan/pemerintahan (dalam negeri), yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk Republik yang merdeka dan berdaulat serta menempatkan hukum di atas segala aspek kehidupan, yang dikenal dengan istilah negera hukum *(rechgstaat)* atau supremasi hukum.

Selain itu, memberdayakan/memfungsikan lembaga legislatif, dengan cara memperjelas ruang lingkup dan kewenangan serta memisahkan kedudukan Ketua MPR dan DPR.

PBB mendorong pengembangan otonomi daerah yang diperluas dan berimbang serta mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa serta dibuka peluang untuk dilakukan audit oleh akuntan publik atas kekayaan pejabat-pejabat tinggi negara.

---

[48] Ibid 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejak didirikan, PBB mengupayakan pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat, membangun budaya politik yang berakhlakul karimah, memperjuangkan dibuatnya Undang-undang Toleransi Beragama serta mengembangkan provinsi menjadi 43 dengan 8 daerah istimewa dan 6 daerah khusus.

Untuk bidang luar negeri, PBB tetap konsisten dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif dengan tetap berdasarkan ideologi negara yang dijiwai oleh nilai-nilai Islam. Meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan, terutama dengan negara-negara tetangga dan negara-negara Islam di seluruh dunia.

Selain itu, menentang segala bentuk kolonialisme, arogansim penindasan dan dominasi dari negara-negara manapun dan menjalin hubungan dan kerjasama. Di bidang pertahanan dan keamanan PBB memperjuangkan pemisahan yang tegas antara Polri dan TNI serta menempatkan Polri di lingkungan Departemen Kehakiman RI. Memperjuangkan pemisahan jabatan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan jabatan Panglima TNI.

PBB mendorong penghapusan dwifungsi TNI dan TNI dikembalikan pada fungsi pertahanan dan keamanan atau kepada fungsi profesionalismenya, menghapuskan keberadaan TNI di DPR.

PBB mendorong penguatan dan pertahanan dan keamanan di bidang kelautan (maritim) untuk melindungi kepentingan Indonesia mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan dari bab-bab sebelumnya merupakan rangkaian alur pembahasan yang ditujukan untuk menjelaskan permasalahan seperti yang sudah menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini. Kesimpulan akhir tentang sekripsi yang berjudul Partai Bulan Bintang (PBB) di Indonesia (Idiologi dan Perjuangan Politik pasca Orde Baru) 1998 – 2004 meliputi latar belakang berdirinya PBB, ideology dan asas PBB serta Perjuangan PBB mulai Th. 1998 – 2004

Dari penelitian skripsi ini dpat disimpulkan sebagai berikut :

1. Partai Bulan Bintang atau yang disingkat PBB, adalah Partai Islam yang lahir pasca Orde Baru runtuh, PBB berdiri pad tanggal 17 juli 1998. Klahiran PBB dilatar belakangi oleh ketidak puasan Tokoh-tokoh ulama Eks Masyumi yang bergabung dalam Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) yang tidak puas dengan para tokoh ulama Eks masyumi berharap agar PBB bisa meneruskan idiologi dan perjuangan Masyumi
2. Adapun yang menjadi pokok-pokok idiologi Partai Bulan Bintang yang di tetapkan dalam muktamar I Partai Bulan Bintang tanggal 24 Muharram 1421 Hijriyah bersamaan dengan 29 April 2000 Miladiyah dijakarta mengeluarkan ketetapan Muktamar I nomor : 07 / TAP / Muktamar I / 200 tentang tafsir asas yang berisi 36 butir, yang menegaskan :
   a. Asas Islam bagi Partai Bulan Bintang dalam segala kegiatannya berpedoman kepada Petunjuk islam yang aktif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Akidah Islam bagi Partai Bulan Bintang bermakna bahwa seluruh anggota Partai meyakini ke esaan Alloh. Tuhan yang patut di sembah

c. Oposisi yang di kembangkan oleh PBB adalah konsep Amar ma'ruf Nahi mungkar

d. Akhlak Islam adalah Norma-norma Universitas dan kaedah akhlak yang harus di pegang teguh oleh setiap pengurus Partai dan kader adalah adil, menegakan amar ma'ruf nahi mungkar dll.

3. Perjuangan PBB yang paling utama yakni memperjuangkan Syariat Islam di Indonesia dan Perubahan pasal 29 ayat (1) yang berbunyi "Negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluknya.

B. Saran

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulis skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang di sebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan-masukan serta saran dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Sebagai parpol Islam di Indonesia PBB mempunyai idiologi dan perjuangan tersendiri. Perjuangan PBB untuk menegakkan syariat islam di Indonesia dan merubah pasal 29 ayat 1. banyak terdapat kesalah fahaman pada masyarakat. Menegakkan syariat islam bukan berarti ingin mendirikan atau merubah NKRI menjadi Negara Islam. Hal ini yang perlu di luruskan dan difahami oleh masyarakat Indonesia. Karena selama ini kebanyakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat Indonesia khusnya non muslim menganggap Partai Bulan Bintang adalah partaiislam yang ingin merubah NKRI menjadi Negara Islam. Maka dariitu tujuan penelitian tentang idiologi dan Perjuangan PBB. Agar tidak terjadi kesalah fahaman. Meskipun masih dipandang sangat kurang dalam hal penelaahan Analisa, penggalian dana, serta aspek akademik lainnya.

Sebagai penutup penulis berharap semoga penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang budiman, dan khusunya bagi mereka yang mempunyai ketertarikan dalam melakukan penelitian kesejarahan dan semoga adanya penelitian skripsi ini dapat menjadi tambahan sumber rujukan bagi mereka yang melakukan penelitian yang sama dalam bidang yang sama dengan penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Hamzah. 1996. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Fajar Mulya.

Aminuddin. 1999. *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Soeharto*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Amir, Zainal Abidin. 2003. *Peta Islam Politik Pasca Soeharto*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

Azra, A Zyumardi. 1996. *Pergolokan Politik Islam*. Jakarta: Paramadina.

Budiman, Arief, Eep Saifullah Fattah, Kuntowijoyo, Ulil Absar Abdalla, *Memilih Partai Mendambakan Presiden*.

Daniel Dhokidue, "*Partai-partai Politik Indonesia Idiologi, strategi dan program*", Kompas, (13/8/1999);

Effendy, Bahtiar. 1993. *Teologi baru Politik Islam "Pertautan Agama dan Negara"*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

_____. *Islam dan Negara Transformasi pemikiran Dan Praktis Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.

Harjono, Anwar. 1997. *Perjalanan Politik Bangsa*. Jakarta: Gema Insani Press.

Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.

L. Hasan, Kuat Sukardione, Dadi MH, *memilih Partai Islam*, (Jakarta: Gema Insana Press,1998),20.

Larrain, Jorge. 1990. *Konsep Idiologi*. Yogyakarta: LKPSM.

Muhtadi, Asep Saeful. 2008. *Komunikasi Politik Indonesia "Dinamika Islam Politik Pasca Orde Baru"* Bandung : Rosdakarya.

Nazir. 1998 *Metode Penelitian* Jakarta Ghali Indonesia.

Novianto, Cholid. 1999. *Era Baru Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

O'Donnell, Guillermo 1993 *Transisi Menuju Demokrasi Tinjauan Berbagai Prespektif*. Jakarta: LP3ES

Pamungkas, Sri Bintang. 2001 *Ke Indonesia Baru lewat Reformasi Total* Jakarta Erlangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Subakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grafindo

Tebba, Sudirman. 1993. *Islam Orde Baru*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.

Tebba, Sudirman. 2001. *Islam pasca Orde Baru*. Yoyakarta: PT. Tiara Wacana.

Anggaran Dasar PBB Bab II Pasal 9.

Dewan Pimpinan Pusat PBB. 2000. *Tafsir Asas Partai Bulan Bintang*. Jakarta.

Dewan Pimpinan Wilayah PBB Jatim. 2005. *Khitiah Perjuangan PBB dan Perjuangan PBB dalam menegakkan syariat Islam*. Surabaya.

DPP PBB. 1999. *Hasil Muktamar I Partai Bulan Bintang*. Jakarta: DPP PBB.

http://www.fredom-institut.org id/index.phn?pag 2 : lokakarya dan id : 517.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id